

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya jualah sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini dapat dilakukan.

Pada dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru ini disajikan Tugas Pokok dan Fungsi, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 serta Matrik Program Lima Tahunan SKPD dan Matrik Program Tahunan SKPD.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, September 2021
Kepala Dinas,

Hi. SITI HAMDAH, SP, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199703 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah....	58
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	60
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	68
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	69
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	71
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	75
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	77
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	89
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	92
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	109
 BAB VIII PENUTUP.....	111
 LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terutama yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1), yang mengatur tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan tersebut, sebagai azas dalam pelaksanaan desentralisasi pada era otonomi daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Salah satu dari SKPD yang dibentuk berdasarkan peraturan tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Tipe A, guna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang struktur dan tata kerjanya disusun berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam urusan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam urusan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan di lingkungan Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

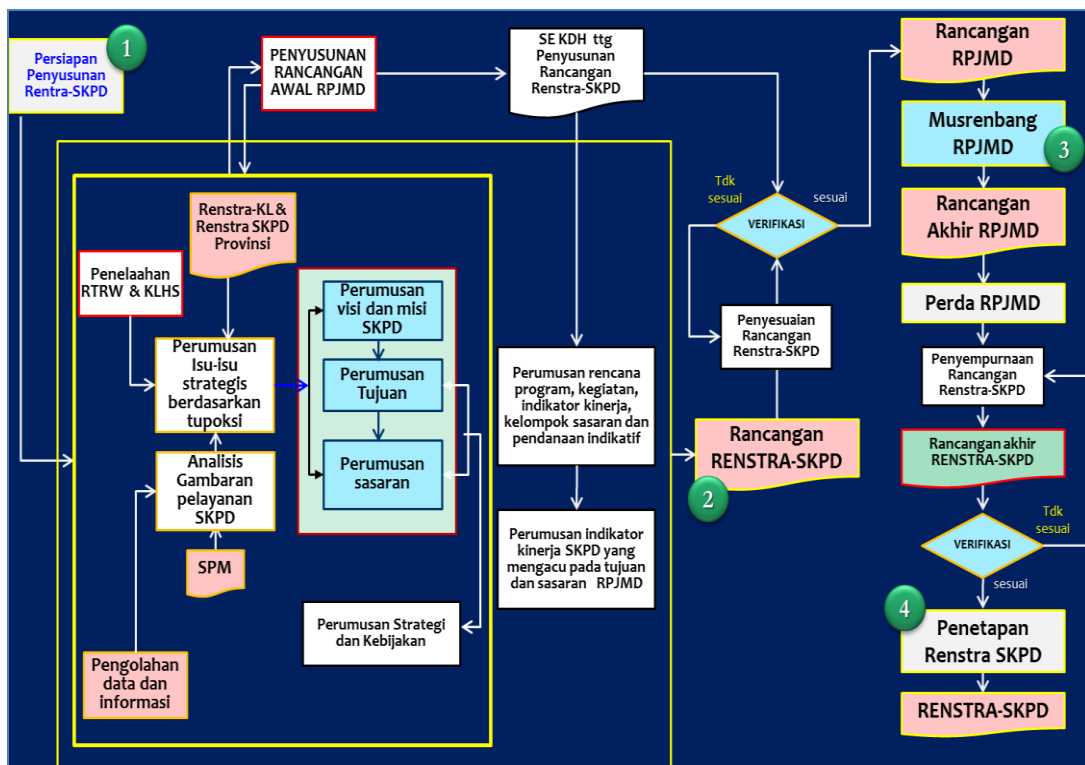
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan

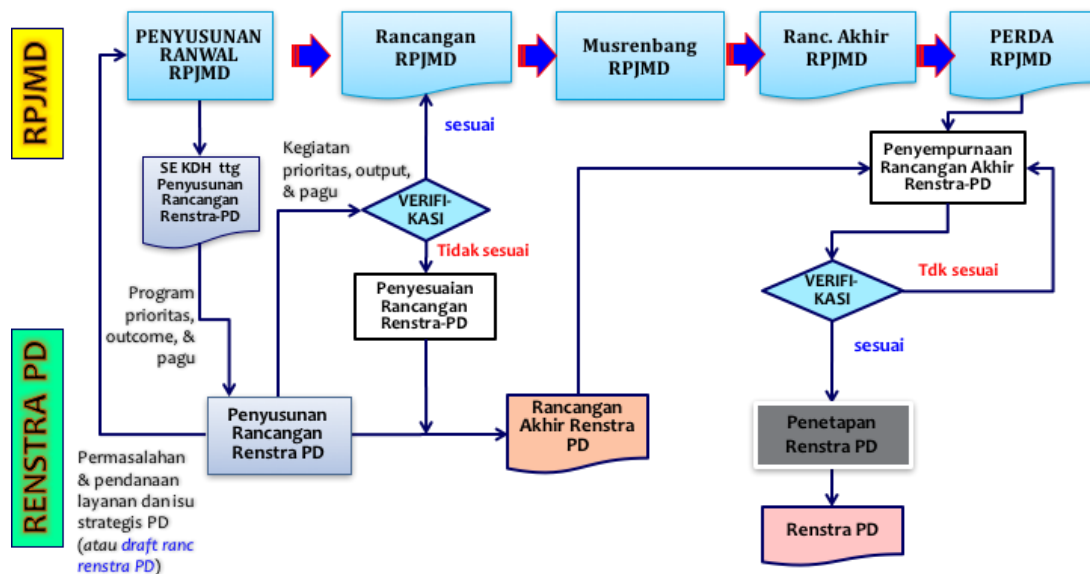
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

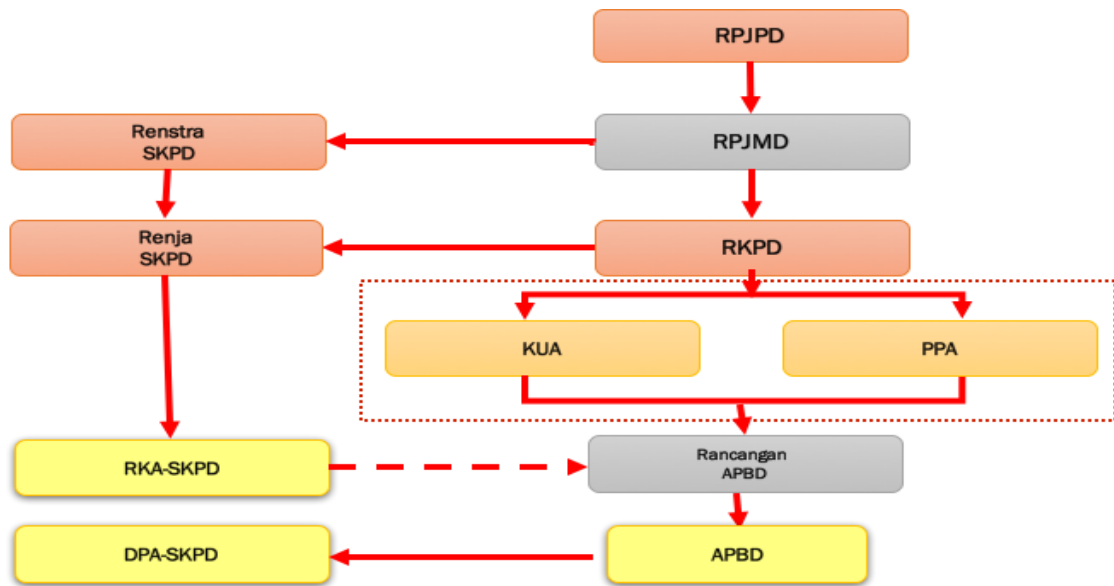
Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih.

Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

27. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32);
28. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
29. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; **Banjarbaru Maju, Agamis, Dan Sejahtera.**

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru ;

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru ;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana

prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang pangan dan bidang penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan.
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
 - b. Pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
 - c. Pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, dan Bidang Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2). Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 3). Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 5). Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;
- 2). Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 3). Pengkoordinasian penyusunan dan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 4). Pengkoordinasian penyelenggaraan kajian dan analisis terhadap semua program di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 5). Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 6). Perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pangan dan penyuluhan;
- 7). Penyelenggaraan urusan sekretariat dinas, umum/perlengkapan dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan teknis pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, penyiapan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan umum, asset/perlengkapan, dan kepegawaian.
- 2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan penatausahaan keuangan;
- 3). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan teknis pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas, penyusunan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan, menyelenggarakan kajian dan analisis program;

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Perencanaan program ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan , mutu dan keamanan pangan;
- 2). Penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan;
- 3). Pengkoordinasian ketersediaan dan distribusi pangan;
- 4). Pelaksanaan pemberian fasilitasi konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
- 5). Pengevaluasi program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
- 6). Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan.

4. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;
- 2). Melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan sarana produksi dan kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan perluasan areal;
- 3). Melaksanakan pembinaan kerjasama pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura dan koordinasi peramalan dan pengamatan hama pengganggu, pengendalian organisme pengganggu, karantina pertanian dan penyiapan sarana perlindungan;
- 4). Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil pertanian serta pembinaan usaha dan kemitraan;
- 5). Melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan monitoring dan evaluasi budidaya tanaman perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan bahan kebijakan teknis pertanian dan perkebunan;

- 2). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan bidang produksi pertanian dan perkebunan;
- 3). Pelaksanaan kegiatan pelaporan, pengadaan, pembinaan dan pengawasan serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- 4). Pembinaan dan monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknis Bidang Pertanian;
- 5). Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap petani dan petugas pertanian dan perkebunan.

5. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan dan produksi peternakan, usaha dan pengolahan hasil peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan veteriner;
- 2). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 3). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 4). Penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani pada bidang peternakan;
- 5). Pelaksanaan pemantauan lain lintas ternak dan unggas masuk dan keluar wilayah Kota Banjarbaru;
- 6). Pelaksanaan penyebaran pengembangan temak, hijauan makanan ternak, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan kredit dan modal usaha tani, pengembangan usaha agribisnis, dan kemitraan;
- 7). Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang peternakan agar sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 8). Pelaksanaan hubungan kerjasama intern dengan bidang-bidang lainnya lingkup dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan serta dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan.

6. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap produksi, pengolahan, usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, peningkatan kesejahteraan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan sumberdaya perikanan serta pendataan hukum bidang perikanan;
- 2). Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan teknis pada Unit Pembinaan Rakyat (UPR) dan dunia usaha serta menyebarluaskan paket teknologi perbenihan dan menyusun standarisasi perbenihan perikanan, agribisnis perikanan, pengendalian dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan;
- 3). Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan dan pembinaan perbenihan, pembinaan kepada pembudidaya ikan yang meliputi pengembangan intensifikasi pembudidayaan ikan (inbudkan) dengan mendayagunakan teknologi budidaya, penanganan pasca panen, pengendalian mutu produk perikanan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- 4). Pelaksanaan pembinaan dan monitoring produk hasil perikanan melalui analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta pengawasan mutu produk hasil perikanan.

7. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang program produksi pertanian dan peternakan, sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- 1). Perencanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
- 2). Pelaksanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
- 3). Pengkoordinasian pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
- 4). Pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan pembinaan serta pendayagunaan sarana prasarana penyuluhan (gedung dan peralatan BPP), sarana penyuluhan tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- 5). Peningkatan SDM penyuluh dan petani;
- 6). Pelaksana fasilitasi pengembangan media penyuluhan dan penyebaran informasi pertanian;
- 7). Pelaksana kemitraan untuk pengembangan sistem penyuluhan pertanian;
- 8). Pengevaluasian program pengembangan SDM penyuluhan dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

1). Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT)

Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja bidang Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait, membina administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan disposisi, arahan dan distribusi tugas, menilai hasil kerja bawahan, memberikan saran dan telaahan, membuat dan menyampaikan laporan, melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air tawar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a). Perumusan program kerja bidang perikanan pada Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar ikan sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b). Pembinaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program produksi perikanan budidaya air tawar sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c). Pengadministrasian, organisasi dan tatalaksana serta personil di lingkungan produksi perikanan budidaya air tawar.

2). Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait, membina administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan disposisi, arahan dan distribusi, membuat dan menyampaikan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a). Pelaksana produksi benih dan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
- b). Pembinaan teknis penyuluhan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c). Pembinaan petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d). Pelaksanaan pengawasan dan menyeleksi benih hasil petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e). Penyusunan rencana teknis perbenihan;
- f). Pelaksana informasi perbenihan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g). Pembinaan hubungan kerjasama dengan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.

3). Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok:

- a). Merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional PPL;
- b). Membina kerjasama dengan instansi/ unit kerja terkait;
- c). Mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, membina administrasi, organisasi tatalaksana serta personil;
- d). Memberikan disposisi, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e). Membimbing, mengarahkan tugas kepada bawahan, mengevaluasi dan memonitor kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan;
- f). Menyusun dan mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul;
- g). Menilai hasil kerja bawahan, memberikan saran/telaahan dan nota pertimbangan kepada atasan;
- h). Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan/laporan hasil kerja kepada atasan dan melaksanakan tugas lain yang diminta atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a). Perumusan program kerja bidang penyuluhan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan pada UPT Balai sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b). Perumusan dan penetapan kebijakan operasional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
- c). Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi/ unit kerja terkait untuk memadukan program balai sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d). Pengkoordinasian, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, merumuskan sasaran dan menetapkan kebijakan operasional, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Balai;

- e). Pengadministrasian, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan balai.

4). Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Dan Pusat Kesehatan Hewan (BTPKH)

Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BTPKH) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak yang berkualitas, melayani pemeriksaan kesehatan ternak dan hewan kesayangan, pelayanan inseminasi buatan, pemberian surat rekomendasi kesehatan hewan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap produsen bibit ternak swasta dan masyarakat ternak.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan (BTPKH) mempunyai fungsi:

- a). Penyiapan bahan dan penyusunan program UPT;
- b). Pelaksanaan produksi, pengadaan, persiapan dan distribusi bibit ternak;
- c). Pelayanan kesehatan ternak dan hewan kesayangan;
- d). Pelayanan inseminasi buatan;
- e). Pembinaan terhadap produsen bibit ternak

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, berdasarkan Peraturan Walikota tersebut maka susunan organisasi dan bagan susunan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi

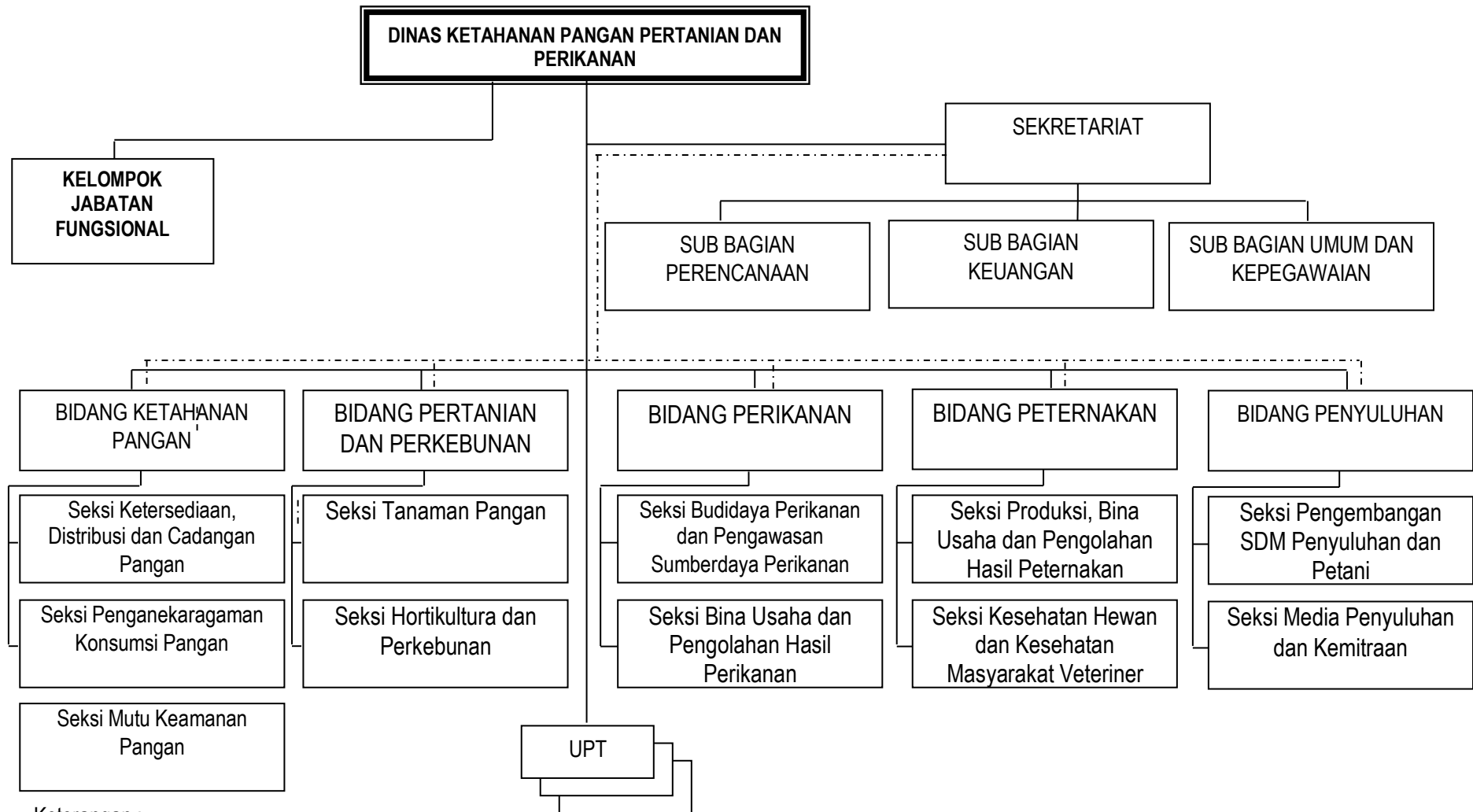
Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Sub Bagian Perencanaan;
 - 3). Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 2). Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3). Seksi Mutu Keamanan Pangan.
- d. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Tanaman Pangan;
 - 2). Seksi Hortikultura dan Perkebunan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Budidaya Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
 - 2). Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 2). Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengembangan SDM Penyuluhan dan Petani
 - 2). Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1). UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT);
 - 2). UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPTH);
 - 3). UPT BPP Liang Anggang;
 - 4). UPT BPP Landasan Ulin;
 - 5). UPT BPP Banjarbaru;
 - 6). UPT BPP Cempaka.
 - 7). UPT Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan (BTPKH)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan tersebut di bawah :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU**



2.2. SUMBER DAYA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru didukung oleh 134 pegawai yang terdiri dari 60 pegawai laki-laki dan 74 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 62 orang, dan golongan IV sebanyak 21 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 9 orang, pendidikan D3 sebanyak 4 orang, pendidikan D4 sebanyak 2 orang, pendidikan S1 sebanyak 56 orang, pendidikan S2 sebanyak 18 orang. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	60	44,77
		Perempuan	74	55,22
2.	Golongan	Golongan I	1	0,74
		Golongan II	6	4,47
		Golongan III	62	46,26
		Golongan IV	21	15,67
		PTT	3	2,23
		Kontrak	34	25,37
3.	Pendidikan	SMP	1	1,11
		SMA	9	10
		D3	4	4,44
		D4	2	2,22
		S1	70	62,22
		S2	21	20

Tabel 2.2 Rincian Jumlah ASN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
1.	SITI HAMDAR, SP, MT	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	S2 Magister Teknik	1. DIKLATPIM TK. III 2. ADUM	
2.	Ir. AZIDIN NOOR, M.AP	Laki-Laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Penyuluhan	S2 MSDM	1. DIKLATPIM TK. III 2. ADUMLA	
3.	Ir. Hj. ISNAWATI, MM	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	S2 Manajemen Sumber Daya Manusia	1. ADUM	
4.	SUTAJI, S.IP, SP	Laki-Laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	S1 Pertanian	1. DIKLATPIM TK. IV	
5.	MUHLAN, SP, MM	Laki-laki	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan	S2 MSDM	1. ADUM 2. DIKLATPIM TK. III	
6.	LINDRI GIWANGING TYAS, S.Pi, MM	Perempuan	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan	S2 MSDM	1.ADUM	
7.	AHMAD RIFANI, S.Pt	Laki-laki	Pembina (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	S1 Produksi Ternak		1.Sertifikasi Profesi Penyuluhan Pertanian PNS 2. Pembekalan Sertifikasi Profesi Penyuluhan Pertanian 3. Paramedis Kesehatan Hewan 4. Kesehatan Hewan 5. Dasar Penyuluhan Pertanian
8.	Ir. NURVANDARIANA, MM	Perempuan	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Budidaya dan Binas Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	S2 MSDM	1.ADUM	
9.	ANWAR PAUJI, S.Pi, M.Si	Laki-laki	Pembina (IV/a)	Kepala Balai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	S2 Ilmu Perairan	1. DIKLATPIM TK. IV	

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
10.	DRH YOHANA KRISWINANTU PRABAWATI,M.Si 196701262000032003	Perempuan	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Peternakan	S-2 Magister Administrasi Publik	1. DIKLATPIM TK. IV	
11.	MUHAMMAD AMINUDDIN SAID,S.TP, MM 196307301986031008	Laki-laki	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	S-2 MSDM	1. DIKLATPIM TK. IV	
12.	DRH RATNA KUSDEWANTI,MM 19690912198032010	Perempuan	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	S-2 MSDM	1. DIKLATPIM TK. IV	
13.	RAHMIYATI, S.Pi, MM 197212071998032012	Perempuan	Pembina (IV/a)	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	S-2 MSDM	1.ADUM	
14.	RISNAWATI,A.Pi, MP 197407111999032003	Perempuan	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM PENYULUHAN DAN PETANI	S-2 BUDIDAYA PERAIRAN	1. DIKLATPIM TK. IV	
15.	SUPIRAH,S.Pt 196404051988032011	Perempuan	Pembina (IV/a)	PENYULUH PERTANIAN MADYA	S-1 PETERNAKAN		
16.	Hj. JUMIATI,SP 196707051987092001	Perempuan	Pembina (IV/a)	PENYULUH PERTANIAN MADYA	S-1 PERTANIAN		
17.	Ir. H. NEFO DJUMANTORO 196310281991031010	Laki-laki	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	1.ADUM	
18.	NOOR ZAINAB, SP, MS 196606161988032017	Perempuan	Pembina (IV/a)	PENYULUH PERTANIAN MADYA	S-2 PENGELOLA SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN		

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
19.	SUGIYO,SP 196711101993031020	Laki-laki	Pembina (IV/a)	PENYULUH PERTANIAN MADYA	S-1 PERTANIAN		1. Diklat Teknis Budidaya Kedelai 2. Diklat Agribisnis Buah 3. Diklat Alih Kelompok Bagi PP 4. Diklat Kehumasan 5. Diklat Dasar Penyuluhan Pertanian
20.	HERRY NISPU YANTO,S.Pt 196611281986031007	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	PERAWAT TERNAK	S-1 PERTANIAN	1.ADUM	
21.	ANI PURWANTI,SP 197008081998032004	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI TANAMANAN PANGAN	S-1 PERTANIAN	1.ADUM	
22.	HAIRANI,S.Pt 196807231992032013	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENYULUH PERTANIAN MUDA	S-1 PRODUKSI TERNAK		
23.	WIWIEN ROBIATY,SP, MP 197503022006042016	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	S-2 PERTANIAN	1. DIKLATPIM TK. IV	
24.	Ir. SRI MARLINAWATI 196703242007012016	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	S-2 PERIKANAN	1. DIKLATPIM TK. IV	
25.	drh ENDAH MARTIANA 198003112009032003	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI MUTU KEAMANAN PANGAN	S-1 PROFESI DOKTER HEWAN	1. DIKLATPIM TK. IV	
26.	RAHMAWATI,S.Pi 198204222005012008	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	S-1 PERIKANAN		
27.	RUSADI,S.Pt 197112252006041017	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN	S-1 PETERNAKAN		
28.	MUHAMMAD WAHYU JUNAIDI,S.Pi 198105062006041016	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA UPT BPP WILAYAH LANDASAN ULIN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1. DIKLATPIM TK. IV	
29.	SRI HAYATI,SP 197307052006042029	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	S-1 PERTANIAN		
30.	NOOR LYANIE,S.Pi 197101212006042027	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	S-1 PERIKANAN		

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
31.	DIANA MEGAWATY,S.P 197707032006042022	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS LAHAN PERTANIAN	S-1 PERTANIAN		
32.	RABIATUL ADAWIYAH,SP, M.Si 197608302007012012	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	S-2 MAGISTER SAINS		
33.	GUNARDI,SP 196809082007011024	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI MEDIA PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	S-1 PERTANIAN		
34.	HARDI,SP 196911042007011029	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN		
35.	RAHMALINA,SP 197508172007012048	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 PERTANIAN		
36.	FRINS USIFARINA MULY,SP 197111102007012018	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN		
37.	RAJAKIAH DARAJAT, S.HUT 198009202007012008	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT BALAI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR	S-1 KEHUTANAN		
38.	ICHNATON ACHMAD KARYADI,S.Pi 197107092007011018	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA UPT BPP WILAYAH BANJARBARU	S-1 BUDIDAYA PERAIRAN		
39.	NOVIA ROESYANTI,S.Pi 197605302007012014	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PROGRAM	S-1 PERIKANAN		
40.	RIZAL FAHLEVI,S.Pi 197712222007011009	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	PENGELOLA GAJI	S-1 PERIKANAN		
41.	MELLY DAMAYANTI,S.Pi 197710202007012016	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	S-1 PERIKANAN		
42.	DRH KURNIA TJAHYO WULAN RAMADHONI 198008092009032009	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI PRODUKSI, BINA USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	S-1 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN		
43.	MISDA YULIANA,SP 197010152008012020	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA UPT BPP WILAYAH CEMPAKA	S-1 PERTANIAN	1. DIKLATPIM TK. IV	

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
44.	NORA SYAHRINI,S.Pi 197408302008012010	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA UPT BPP WILAYAH LIANG ANGGANG	S-1 PERIKANAN		
45.	APRIANSYAH,SP 196804242008011017	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	S-1 PERTANIAN		
46.	RIMA ISLIANNOR,S.Pi 196905072006042007	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS PENYAJIAN DATA SUMBER DAYA IKAN	S-1 PERIKANAN		
47.	DETTY FITRIANITA,SP 197609302008012017	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN		
48.	KIKI HANDAYANI,S.Pi 198108292008032001	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS PANGAN	S-1 PERIKANAN		
49.	DRH. RINA PARLINA 197709042011012001	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	MEDIK VETERINER MUDA	S-1 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN		1. Diklat Dasar Fungsional Medik Veteriner
50.	NINING INDRAWATI,SP 196603151995012001	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENYULUH PERTANIAN MUDA	S-1 AGRIBISNIS		1.Diklat Fungsional Dasar Ahli
51.	WITA WULAN SARI,SP 198111172006042014	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENYULUH PERTANIAN MUDA	S-1 PERTANIAN		1.Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli
52.	ERLINA HIDAYATI,SP 197601042010012004	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENYULUH PERTANIAN MUDA	S-1 PERTANIAN		1.Diklat Dasar Ahli
53.	Drh. WIDODO PUJIATMOKO 197706132009031006	Laki-laki	Penata (III/c)	MEDIK VETERINER MUDA	S-1 KEDOKTERAN HEWAN		
54.	YULIDA HELMA,S.Hut 197801022009012002	Perempuan	Penata (III/c)	BENDAHAARA	S-1 KEHUTANAN		
55.	ISNA YULIANA,SP 197507022006042021	Perempuan	Penata (III/c)	PENYULUH PERTANIAN MUDA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN		
56.	DIAH PUSPITA SARI,S.Pi, MP 197902062010012002	Perempuan	Penata (III/c)	PENELAHAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH / BIBIT	S-2 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN		
57.	WIWIEK SULISTYANING HARI,SP 197508052006042030	Perempuan	Penata (III/c)	PENYULUH PERTANIAN MUDA	S-1 PERTANIAN		1.Diklat Dasar Ahli Bagi Penyuluh Pertanian 2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
58.	DYAH WAHYUNINGSIH,S.Pt 197601232011012002	Perempuan	Penata (III/c)	PENGADMINISTRASI UMUM	S-1 PETERNAKAN		
59.	SRI YULIANI,SP 197602162011012003	Perempuan	Penata (III/c)	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	S-1 PERTANIAN		
60.	EZIDDIN MUTTAQIN,S.Hut, MM 197606212009011002	Laki-laki	Penata (III/c)	ANALIS INFORMASI PASAR HASIL PERTANIAN	S-2 MAGISTER MANAJEMEN		
61.	WIWIT INDRI ASTUTI,S.Hut 198307052011012002	Perempuan	Penata (III/c)	PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	S-1 MANAJEMEN HUTAN		
62.	HAJUN FATIMAH,SP 196308302002122001	Perempuan	Penata (III/c)	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN		
63.	NORDAHNIAR 196305271987032009	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	VERIFIKATOR KEUANGAN	SPP		
64.	DHANI KUMOROZANI 197106201993031003	Laki-laki	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR,KECIL,DAN UNGGAS	SPP SNAKMA		
65.	MUHAMMAD FIRMAN NAFARIN,SP 197403222006041012	Laki-laki	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PERTANIAN		1.Diklat Dasar Ahli Bagi Penyuluh Pertanian 2. SL-SPII Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
66.	HETTY MARIA,S.Hut 197706062014062003	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	ANALIS MATERI PENYULUHAN	S-1 KEHUTANAN		
67.	NOFI PUJIASTUTI,S.T.P 198011242014062001	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN		

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
68.	SERI DEWI ASTUTI,SP 198510132006042006	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PERTANIAN		1. Diklat Alih Kelompok 2. Diklat Teknis Budidaya Padi 3. Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian 4. Latihan Dasar Bagi Penyuluh Pertanian Terampil 5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
69.	YULIA RESTY,SP 198607162015032002	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PERTANIAN		1. Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli
70.	RABIATUL ADAWIYAH,S.P 198204152010012008	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS SOSIAL EKONOMI PERTANIAN		1. Latdas Penyuluh Pertanian Terampil
71.	NUR SULHA NILAWATI,SP 198201132015032001	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PERTANIAN		1. Diklat Teknis Cabe Merah
72.	TINO LUKMAN HIDAYAT,S.ST 198902022010011001	Laki-laki	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	D-IV PENYULUHAN PETERNAKAN / 2016		1. Alih Kelompok Penyuluh Pertanian 2. Peningkatan Kompetensi Bidang Inseminasi Buatan 3. Peningkatan Kompetensi Paramedik Kesehatan Hewan 4. Peningkatan Kompetensi Keurmaster

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
							5. Diklat Dasar Terampil Penyuluh Pertanian
73.	RISTIA SARI MARETTA,S.P 198903022015032002	Perempuan	Penata Muda (III/a)	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PERTAMA	S-1 PERTANIAN		
74.	SAIDA FITHRIA,SP 198304282017062001	Perempuan	Penata Muda (III/a)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS		
75.	DANA APRILLAS BUNGA,SP 198304112017061002	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PERTANIAN		
76.	ERNA SUSANTI,SP 198505022017062002	Perempuan	Penata Muda (III/a)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN		
77.	DORPI HELWINA SIAHAAN,SP 198407072017062002	Perempuan	Penata Muda (III/a)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN (PKP)		
78.	YUANITA MEIRINDAWATI,SST 198505242017062001	Perempuan	Penata Muda (III/a)	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	D-IV PENYULUH PERTANIAN		
79.	YURIKA DAHLIANA,A.Md 198002132010012002	Perempuan	Penata Muda (III/a)	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	D-III KEHUTANAN		
80.	NURIS RAMADHAN,A.Md 198505252010011011	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	PENGELOLA GAJI01 Februari 2019	D-III KOMPUTER AKUNTANSI		
81.	IWAN JULIANTO,A.Md 198407242010011009	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	PENATA LAPORAN KEUANGAN	D-III PERTANIAN		
82.	M. IBRAHIM IDEHAM 196311091986031012	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IPA		1.Penyusunan PPL Ex. Crash Program angk. I 2. Crash Program Capet Ternak Unggas
83.	SRI WAHYUNI 197005142006042009	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN PERIKANAN	SMT PERTANIAN		
84.	ASRIADI 196803022007011036	Laki-laki	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGADMINISTRASI UMUM	SMT PERTANIAN		
85.	REFI KUNMARIANA,A.Md 198408192017062001	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	D-III KESEHATAN TERNAK		1.Diklat Teknis Budidaya cabe

	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
86.	EKO HARY PRIYANTO 198110242009011001	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SPP		
87.	FAJAR ISMAIL 198206012010011001	Laki-laki	Pengatur (II/c)	PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IPS		
88.	RIJALUL FIKRI 197801172012121002	Laki-laki	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IPA		
89.	DWI PUSPA YULIANI 198107012012122001	Perempuan	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IPA		
90.	ZUNIF EFFENDY 196312301985031018	Laki-laki	Juru Tingkat I (I/d)	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		

Sumber daya yang dimiliki oleh Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru terdiri atas 3 macam yaitu :

1. Sumber daya aparatur

Sumber daya aparatur sangat menentukan terhadap proses pelaksanaan tata pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi dari SKPD. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 didukung oleh 134 orang personil, yang terdiri dari :

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Kepala Dinas	1 orang	-	1
2.	Sekretaris	1 orang	-	1
3.	Kepala Bidang	5 orang	4	1
6.	Kepala Sub. Bagian	3 orang	-	3
4.	Kepala Seksi	11 orang	2	9
5.	Kepala UPT	7 orang	5	2
6.	Kepala Tata Usaha	2 orang	-	2
7.	Penyuluh	30 orang	12	18
8.	Staf	74 orang	37	37
Jumlah		134	60	74

Berdasarkan statusnya maka pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, terdiri atas :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	PNS	90 orang	30	60
2.	P3K	7 orang	6	1
3.	PTT	3 orang	2	1
4.	Tenaga Kontrak	34 orang	22	12
Jumlah		134	60	74

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia ketahanan pangan, pertanian dan perikanan adalah adanya penduduk. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan jika disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang handal. Diperlukan manajemen kependudukan yang tepat agar dapat memanfaatkan faktor penduduk menjadi faktor kunci dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru.

3. Sumber daya ketahanan pangan, pertanian dan perikanan

Kota Banjarbaru mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Sumber daya tersebut antara lain berupa ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, perincian sumberdaya alam tersebut berdasarkan bidangnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Ketahanan Pangan

- 1). Tersedianya pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan;
- 2). Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen;
- 3). Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- 4). Meningkatnya konsumsi energi dan protein masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
- 5). Tercapainya pengawasan keamanan pangan segar

b. Pertanian

- 1). Hanya sekitar $\pm 1\%$ dari total wilayah lahan pertanian pangan Kalsel
- 2). Lahan tanaman pangan didominasi sawah (1.786 Ha), Hortikultura (817 Ha)
- 3). Lahan sawah dominan pada Kec Cempaka
- 4). Buah – buahan pada Kec Cempaka
- 5). Sayur – sayuran pada Kec Landasan Ulin dan Kec Liang Anggang
- 6). Dalam lingkup Kalsel, beberapa jenis komoditas sayuran Banjarbaru mempunyai keunggulan antara lain sawi, ketimun, kangkung dan bayam

c. Peternakan Banjarbaru

- 1). Ternak Besar (Sapi)
 - a). Potensial dalam populasi ternak

- b). Berperan strategis dalam lalu lintas ternak (jalur terpadat lalu lintas ternak Kalsel)
 - c). Potensial sebagai pemasok daging untuk kebutuhan pasar Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura
 - d). Jumlah ternak dipotong tertinggi setelah Banjarmasin (2920 ekor pada tahun 2015 atau rata– rata 8 ekor per hari)
 - e). Tersediannya HMT (Hijauan Makanan Ternak)
 - f). Potensial memproduksi substitusi dan komplemen pakan ternak
- 2). Ternak Kecil (Kambing)
 - a). Populasi kambing 3.403 ekor
 - b). Secara ekonomis usaha ini sangat menguntungkan
 - c). Secara teknis tidak ada kendala yang berarti
- 3). Unggas (Ayam Potong)
 - a). Sentra produksi utama Kalimantan Selatan terutama DOC dan daging
 - b). Produksi dan pemasaran dikembangkan dengan pola kemitraan
 - c). Pasokan pakan tergantung pada wilayah lain
 - d). Rentan terhadap penyakit
- 4). Unggas (Ayam Buras)
 - a). Tingkat permintaan pasar tinggi
 - b). Diusahakan secara ekstensif
 - c). Relatif lebih adaptable
 - d). Potensial dikembangkan usaha semi intensif untuk ayam buras potong (ayam buras umur 3 – 4 bulan) pada wilayah pinggiran Kota Banjarbaru
 - e). Perlu kaji – terap untuk pengelolaan usaha tani ayam buras potong berkesinambungan
- d. Perkebunan Banjarbaru
 - 1). Komoditas dominan : Karet
 - 2). Penerapan teknis pasca panen perlu dibenahi
 - 3). Pembangunan sebaiknya diarahkan pada :
 - a). Industri Hilir (industri pengolahan produk perkebunan karet)
 - b). Manajemen distribusi (input – output)
 - c). Sentra bibit karet berkualitas dan bersertifikasi

e. Perikanan Banjarbaru

- 1). Mas – Nila – Patin merupakan komoditas utama budidaya perairan air tawar
- 2). Penangkapan ikan di perairan umum masih besar kontribusinya
- 3). Dalam kerangka Kalsel, tingkat produksi insignificant
- 4). Keterbatasan lahan merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha
- 5). Pola usaha relatif intensif dengan teknis budidaya memadai
- 6). Sistem jaring apung di Kelurahan Palam dan di Guntung Manggis
- 7). Kolam : produksi ikan konsumsi dan benih ikan
- 8). Pasar Benih Ikan dan Balai Benih Ikan

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG			TAHUN PENGADAAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
A	Tanah					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (DKP-3)	1.373 m2	√			2018
2	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan	10.117 m2	√			2008
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BBTPH)	9.860 m2	√			2008
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (RPH G. Kupang)	26.537 m2	√			2000
5	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	299 m2	√			2015
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BPP BJB)	12.678 m2	√			2000
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Cempaka)	5.269 m2	√			2019
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BPP LU)	3.655 m2	√			2000
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BPP LU)	10.000 m2	√			2000

10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BPP LU)	2.535 m2	√			2015
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BPPLU)	2.958 m2	√			2015
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (BPPLA)	4.509 m2	√			2015
B	ALAT DAN MESIN					
1	Mesin Proses Lainnya	2	√			2010
2	Transportable Water Pump	2	√			2010
3	Stationary Water Pump	1	√			2009
4	Pick Up	1		√		2007
5	Pick Up	1		√		2009
6	Pick Up	1		√		2013
7	Sepeda Motor	16		√		2008
8	Sepeda Motor	4		√		2010
9	Sepeda Motor	1		√		2011
10	Sepeda Motor	2		√		2013
11	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	2		√		2010
12	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	1		√		2011
13	Global Positioning System	2	√			2014
14	A.C. Split	2	√			2014
15	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1	√			2014
16	Lemari Besi/Metal	1	√			2001
17	Lemari Besi/Metal	3	√			2003
18	Lemari Besi/Metal	1	√			2004
19	Lemari Besi/Metal	4	√			2007
20	Lemari Besi/Metal	2	√			2008
21	Lemari Besi/Metal	7	√			2010
22	Lemari Besi/Metal	2	√			2014
23	Filing Cabinet Besi	2	√			2002
24	Filing Cabinet Besi	1	√			2003
25	Filing Cabinet Besi	2	√			2004
26	Filing Cabinet Besi	5	√			2008
27	Filing Cabinet Besi	1	√			2010
28	Brandkas	1	√			2010
29	Lemari Kaca	1	√			2012
30	Lemari Kaca	1	√			2014
31	Papan Pengumuman	1	√			2014
32	White Board	1	√			2013
33	White Board	2	√			2007
34	White Board	1	√			2009
35	White Board	1	√			2013
36	White Board	3	√			2002
37	White Board	1	√			2005

38	White Board	2	√			2012
39	Meja Kerja Kayu	6	√			2001
40	Kursi Besi/Metal	1	√			2014
41	Meja Rapat	7	√			2013
42	Sofa	1	√			2003
43	Sofa	1	√			2011
44	Sofa	1	√			2012
45	Gordyin/Kray	2	√			2011
46	Gordyin/Kray	1	√			2014
47	Karpet	1	√			2012
48	Lemari Es	1	√			2004
49	Lemari Es	1	√			2010
50	Lemari Es	2	√			2013
51	Lemari Es	2	√			2014
52	Lemari Es	1	√			2012
53	Televisi	1	√			2009
54	Televisi	1	√			2011
55	Televisi	2	√			2013
56	Televisi	1	√			2014
57	Loudspeaker	2	√			2010
58	Sound System	1	√			2012
59	Camera film	1	√			2010
60	Camera film	2	√			2011
61	Handy Cam	1	√			2013
62	P.C Unit	1	√			2008
63	P.C Unit	3	√			2011
64	P.C Unit	3	√			2013
65	P.C Unit	5	√			2014
66	Lap Top	2	√			2009
67	Lap Top	2	√			2012
68	Lap Top	2	√			2013
69	Lap Top	2	√			2014
70	Note Book	1	√			2012
71	Note Book	2	√			2013
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2012
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2013
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	√			2014
75	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	√			2013
76	Modem	2	√			2011
77	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√			2008
78	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√			2013
79	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	√			2014

80	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	√			2013
81	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√			2014
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	√			2013
83	Microphone/Wireless MIC	1	√			2009
84	Microphone/Wireless MIC	1	√			2010
85	Power Amplifier	1	√			2010
86	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2013
87	Film Projector	2	√			2013
88	Camera Film	4	√			2013
89	Wireless Amplifier	1	√			2010
90	Wireless Amplifier	1	√			2013
91	Pick Up	1	√			2015
92	Sepeda Motor	3	√			2015
93	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	1	√			2015
94	Global Positioning System	2	√			2015
95	A.C. Split	5	√			2015
96	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2	√			2015
97	Lemari Besi/Metal	5	√			2015
98	Lemari Es	1	√			2015
99	Televisi	4	√			2015
100	P.C Unit	5	√			2015
101	Lap Top	3	√			2015
102	Note Book	1	√			2015
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	√			2015
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	√			2015
105	Wireless Amplifier	4	√			2015
106	Test Kit	2	√			2015
107	Station Wagon	1	√			2016
108	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	8	√			2016
109	P.C Unit	8	√			2016
110	Lap Top	5	√			2016
111	Note Book	1	√			2016
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	√			2016
113	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√			2016
114	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	√			2016
115	Camera Film	1	√			2016
116	Telephone Mobile	10	√			2016
117	Bak Fiberglass	4	√			2016
118	Station Wagon	1	√			2015
119	Sepeda Motor	14		√		2014
120	Sepeda Motor	1		√		2003
121	Sepeda Motor	1		√		2005

122	Sepeda Motor	1		√		2006
123	Sepeda Motor	9		√		2008
124	Sepeda Motor	8		√		2013
125	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	4		√		2015
126	Global Positioning System	6	√			2015
127	Lemari Besi/Metal	6	√			2014
128	Lemari Besi/Metal	7	√			2015
129	Filing Cabinet Besi	8	√			2014
130	Filing Cabinet Besi	4	√			2015
131	Filing Cabinet Besi	1	√			2013
132	Brandkas	1	√			2015
133	Lemari Besi/Metal	7	√			2015
134	Lemari Besi/Metal	1	√			2012
135	Meja Rapat	1	√			2014
136	Meja Rapat	2	√			2008
137	Kursi Tamu	1	√			2014
138	Lemari Es	2	√			2014
139	Lemari Es	1	√			2015
140	Televisi	1	√			2014
141	Televisi	1	√			2008
142	Camera Video	1	√			2014
143	P.C Unit	2	√			2014
144	P.C Unit	3	√			2015
145	P.C Unit	4	√			2013
146	Lap Top	2	√			2014
147	Lap Top	2	√			2015
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	√			2015
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√			2013
150	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√			2014
151	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	√			2014
152	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	√			2015
153	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	√			2014
154	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	√			2015
155	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	√			2014
156	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	√			2015
157	Camera Electronic	1	√			2015
158	Camera Film	3	√			2013
159	Facsimile	1	√			2014
160	Wireless Amplifier	2	√			2014
161	Sepeda Motor	6	√			2016
162	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	2	√			2016
163	Lemari Besi/Metal	1	√			2016
164	Lemari Es	1	√			2016

165	Televisi	1	√			2016
166	Wireless	1	√			2016
167	P.C Unit	4	√			2016
168	Lap Top	4	√			2016
169	Note Book	1	√			2016
170	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	√			2016
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2017
172	Bangku Tunggu	1	√			2017
173	Sofa	7	√			2017
174	Lap Top	1	√			2017
175	Note Book	3	√			2017
176	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2017
177	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19	√			2017
178	Meja Periksa Pasien	1	√			2017
179	CCTV - Camera Control Television System	2	√			2017
180	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√			2018
181	Buffet Kayu	1	√			2018
182	Buffet Kaca	2	√			2018
183	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√			2018
184	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	√			2018
185	Lap Top	2	√			2018
186	P.C Unit	1	√			2018
187	Alat Pemadam/Portable	6	√			2018
188	Container	1	√			2018
189	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya (BPP LU)	1		√		2018
190	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya (BPP LA)	1		√		2018
191	Station Wagon	1		√		2009
192	Rak Kayu	1		√		2018
193	Sepeda Motor	4		√		2019
194	A.C. Split	3	√			2019
195	Lemari Besi/Metal	2	√			2019
196	Rak Besi	3	√			2019
197	Papan Nama Instansi	1	√			2019
198	Papan Pengumuman	1	√			2019
199	Mesin Absensi	1	√			2019
200	P.C Unit	2	√			2019
201	Lap Top	8	√			2019
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	√			2019

203	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	√			2019
204	Microphone/Wireless MIC	1	√			2019
205	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	√			2019
206	Lensa Kamera	1	√			2019
207	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2018
208	Gorden	12	√			2020
209	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	√			2020
210	Kursi Pejabat Ese 3	1	√			2020
211	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	√			2020
212	Printer E L3110	1	√			2020
213	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√			2020
214	Filling Besi/Metal	6	√			2020
215	Air Conditioning Unit	4	√			2020
216	Meja Rapat	1	√			2020
217	Kursi Lipat	30	√			2020
218	Meja Biro	10	√			2020
219	Kursi Kerja	10	√			2020
220	Kursi Kerja	1			√	2011
221	Lemari Besi/Metal	2			√	2001
222	Lemari Besi/Metal	1			√	2002
223	Lemari Besi/Metal	1			√	2004
224	A.C. Split	1			√	2012
225	P.C Unit	1			√	2009
226	P.C Unit	1			√	2010
227	Lap Top	1			√	2013
228	Note Book	1			√	2008
229	Pompa Air	1			√	2013
230	P.C Unit	1			√	2009
231	Lap Top	1			√	2013
232	Monitor	1			√	2012
233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2015
234	Handy Talky (HT)	1			√	2013
235	Mesin Packing/ Starpping Machine	1			√	2010
236	P.C Unit	1			√	2013
237	Note Book	1			√	2012
238	Stationary Generating Set	1			√	2010
239	Global Positioning System	2			√	2013
240	A.C. Split	2			√	2014
241	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	1			√	2013
242	Televisi	1			√	2013
243	Sound System	1			√	2002
244	Note Book	2			√	2010

245	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2011
246	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2013
247	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1			√	2011
248	Camera Film	1			√	2013
249	Facsimile	1			√	2014
250	Televisi	1			√	2015
251	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5			√	2015
252	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1			√	2015
253	Mesin Absensi	1			√	2016
254	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3			√	2016
255	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1			√	2014
256	Televisi	1			√	2014
257	Lap Top	1			√	2015
258	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2			√	2014
259	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2			√	2015
260	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2013
261	Lap Top	1			√	2016
262	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2016
263	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4			√	2016
264	A.C. Split	6			√	2017
265	Genset	1			√	2017
266	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2009
267	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2			√	2014
268	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2015
269	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2004
270	P.C Unit	1			√	2013
271	Televisi	1			√	2000
272	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1			√	2008
273	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2013
274	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2015

275	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1			√	2015
276	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2013
277	Televisi	1			√	2016
278	Genset	1			√	2016
279	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2009
280	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2			√	2014
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2015
282	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1			√	2004
	BPBAT					
283	Elektrik Panel Cintel	1	√			2010
284	A.C. Split	3	√			2014
285	A.C. Split	2	√			2010
286	Lemari Besi/Metal	5	√			2011
287	Meja Rapat	3	√			2012
288	Sofa	1	√			2009
289	Lemari Es	4	√			2009
290	Lemari Besi/Metal	3	√			2015
291	Lemari Es	1	√			2015
292	Televisi	1	√			2015
293	P.C Unit	5	√			2015
294	Bak Fiberglass	5	√			2015
295	Kompas Gas (Alat Laboratorium Makanan)	2	√			2015
296	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2016
297	Mesin Absen (Time Recorder)	2	√			2017
298	Mesin Pengering	1	√			2010
299	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
300	Teralis	2	√			2009
301	Teralis	1	√			2012
302	Rak Besi	20	√			2019
303	Tangga Aluminium	1	√			2019
304	Pompa Air	10	√			2019
305	Lap Top	1	√			2019
306	Discicator/Eksikator	1	√			2019
307	Timbangan Elektronik	1	√			2019
308	Microscope	1	√			2019
309	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1	√			2019
310	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	√			2019
311	Bak Fiberglass	2	√			2020

312	Jaring Angkat Lainnya	1	√			2020
313	Rak Kayu	3	√			2020
314	Frezeer	1	√			2020
315	Aquarium	6	√			2020
316	Portable Ultra Violet Rays Lamp	4	√			2019
	BBTPH					
317	Gerbong Barang Terbuka	1	√			2010
318	Gerbong Barang Terbuka	1	√			2013
319	Televisi	1	√			2015
320	Televisi	1	√			2012
321	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1	√			2015
322	Lemari Besi/Metal	1	√			2015
323	Mesin Pemotong Rumput	1	√			2015
324	Alat Pelobang (Cork Borer)	2	√			2015
325	Lemari Besi/Metal	2	√			2016
326	Kursi Tamu	1	√			2016
327	Tangga Aluminium	1	√			2016
328	Lap Top	1	√			2016
329	Mesin Absen (Time Recorder)	2	√			2017
330	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
331	Lemari Besi/Metal	3	√			2019
	BPTPKH					
332	Lap Top	1	√			2013
333	Lemari Besi/Metal	1	√			2015
334	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
335	A.C. Split	1	√			2019
336	Portable Generating Set	1	√			2019
337	P.C Unit	1	√			2019
338	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2019
339	Mesin Tetas	2	√			2020
	BPP BJB					
340	Global Positioning System	1	√			2015
341	A.C. Split	1	√			2014
342	A.C. Split	2	√			2015
343	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	√			2015
344	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	√			2008
345	Filing Cabinet Besi	3	√			2008
346	Brandkas	1	√			2015
347	Papan Nama Instansi	1	√			2014
348	White Board	1	√			2013
349	White Board	1	√			2015
350	Meja Rapat	3	√			2014

351	Meja Rapat	9	√			2008
352	Sofa	2	√			2015
353	Sofa	1	√			2008
354	Camera film	5	√			2015
355	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1	√			2016
356	Lemari Kaca	1	√			2016
357	Sofa	1	√			2016
358	Lemari Es	1	√			2016
359	Rak Piring Alumunium	1	√			2016
360	Wireless	1	√			2016
361	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2017
362	P.C Unit	2	√			2013
363	P.C Unit	1	√			2015
364	Lap Top	3	√			2016
365	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2013
366	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2014
367	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	√			2013
368	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2013
369	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2015
370	Camera Film	1	√			2013
371	Wireless Amplifier	1	√			2013
372	Kompor Gas (Alat Laboratorium Makanan)	1	√			2015
373	Soil Moisture Tester	1	√			2015
374	Soil Moisture Tester	3	√			2014
375	Soil Moisture Tester	1	√			2008
376	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	√			2015
377	Lemari Besi/Metal	1	√			2015
378	Papan Pengumuman	1	√			2016
379	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
380	Teralis	1	√			2009
381	P.C Unit	1	√			2019
382	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2019
	BPP CEMPAKA					
383	A.C. Split	1	√			2014
384	Televisi	1	√			2013
385	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2015
386	Global Positioning System	1	√			2015
387	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	√			2015
388	Filing Cabinet Besi	3	√			2008
389	Brandkas	1	√			2015

390	Lemari Besi/Metal	2	√			2015
391	White Board	1	√			2013
392	White Board	1	√			2015
393	Meja Kerja Kayu	1	√			2004
394	Meja Kerja Kayu	1	√			2007
395	Meja Rapat	2	√			2014
396	Kursi Biasa	1	√			2008
397	Meja 1/2 Biro	3	√			2004
398	Sofa	2	√			2015
399	Sofa	1	√			2008
400	Camera film	3	√			2015
401	P.C Unit	2	√			2013
402	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	√			2013
403	External CD/ DVD Drive (ROM)	3	√			2014
404	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2013
405	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2015
406	Film Projector	1	√			2013
407	Camera Film	1	√			2013
408	Wireless Amplifier	1	√			2013
409	Kompor Gas (Alat Laboratorium Makanan)	1	√			2015
410	Soil Moisture Tester	1	√			2015
411	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1	√			2016
412	Lemari Kaca	1	√			2016
413	Sofa	1	√			2016
414	Lemari Es	1	√			2016
415	Rak Piring Alumunium	1	√			2016
416	Wireless	1	√			2016
417	Lap Top	3	√			2016
418	Mesin Absen (Time Recorder)	2	√			2017
419	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	√			2015
420	Papan Pengumuman	1	√			2016
421	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
422	P.C Unit	1	√			2019
423	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			2019
	BPP LU					
424	Global Positioning System	1	√			2015
425	A.C. Split	1	√			2014
426	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	√			2015
427	Brandkas	1	√			2015
428	White Board	1	√			2013
429	White Board	1	√			2015
430	White Board	1	√			2001

431	Meja Rapat	2	√			2014
432	Sofa	2	√			2015
433	Camera film	3	√			2015
434	P.C Unit	1	√			2013
435	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	√			2013
436	External CD/ DVD Drive (ROM)	3	√			2014
437	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2013
438	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2015
439	Film Projector	1	√			2013
440	Camera Film	1	√			2013
441	Wireless Amplifier	1	√			2013
442	Kompor Gas (Alat Laboratorium Makanan)	1	√			2015
443	Soil Moisture Tester	1	√			2015
444	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	2	√			2016
445	Sofa	1	√			2016
446	Lemari Es	1	√			2016
447	Rak Piring Alumunium	1	√			2016
448	Wireless	1	√			2016
449	Lap Top	3	√			2016
450	Mesin Absen (Time Recorder)	2	√			2017
451	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	√			2015
452	Papan Pengumuman	1	√			2016
453	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
454	Komputer Lenovo AIO 520	1	√			2019
455	Printer	1	√			2019
	BPP LA					
456	Global Positioning System	1	√			2015
457	A.C. Split	1	√			2014
458	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	√			2015
459	Filing Cabinet Besi	2	√			2008
460	Brandkas	2	√			2015
461	Meja Rapat	2	√			2014
462	Sofa	1	√			2015
463	Sofa	1	√			2008
464	Sofa	1	√			2015
465	Televisi	1	√			2013
466	Camera film	3	√			2015
467	P.C Unit	1	√			2012
468	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	√			2013
469	External CD/ DVD Drive (ROM)	7	√			2014
470	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	√			2015
471	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2013

472	Audio Tape Reel Recorder	1	√			2015
473	Film Projector	1	√			2013
474	Camera Film	1	√			2013
475	Wireless Amplifier	1	√			2013
476	Kompor Gas (Alat Laboratorium Makanan)	1	√			2015
477	Soil Moisture Tester	1	√			2015
478	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	2	√			2016
479	Papan Pengumuman	1	√			2016
480	Sofa	1	√			2016
481	Lemari Es	1	√			2016
482	Rak Piring Aluminium	1	√			2016
483	Wireless	1	√			2016
484	Lap Top	3	√			2016
485	Mesin Absen (Time Recorder)	2	√			2017
486	White Board	1	√			2013
487	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√			2019
C	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√			2012
3	Gedung Pos Jaga Permanen	1	√			2013
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2017
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2008
	BPP BJB					
6	Pagar Permanen	1	√			2014
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2015
8	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1	√			2015
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
11	Pagar Permanen	1	√			2009
12	Gedung Pos Jaga Permanen	1	√			2012
13	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	√			2013
	BPBAT					
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009

16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
26	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2011
29	Pagar Permanen	1	√			2009
30	Pagar Permanen	1	√			2010
31	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2009
32	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2009
33	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2009
34	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2009
35	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2011
36	Rumah Panel	1	√			2009
37	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2010
38	Bangunan Prasarana Gedung	1	√			2009
39	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√			2009
40	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	√			2009
41	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2015
42	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2020
43	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2020
44	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2020
45	Pagar Permanen	1	√			2020
46	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	√			2009

	BBTPH					
47	Pagar Permanen	1	√			2010
48	Pagar Permanen	1	√			2013
49	Gedung Pos Jaga Permanen	1	√			2014
50	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	√			2015
51	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	√			2019
52	Bangunan Prasarana Gedung	1	√			2020
	BPTPKH					
53	Gedung Pemotong Hewan Permanen	1	√			2012
54	Bangunan Untuk Kandang	1	√			2017
55	Bangunan Untuk Kandang	1	√			2019
56	Bangunan Untuk Kandang	1	√			2019
57	Pagar Permanen	1	√			2019
	BPP CEMPAKA					
58	Pagar Permanen	1	√			2014
59	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2015
60	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
61	Pagar Permanen	1	√			2009
62	Gedung Pos Jaga Permanen	1	√			2012
	BPP LU					
63	Pagar Permanen	1	√			2014
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2015
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2009
66	Pagar Permanen	1	√			2009
	BPP LA					
67	Pagar Permanen	1	√			2009
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			2012
69	Bangunan Prasarana Gedung	1	√			2019
D	JARINGAN/IRIGASI					
1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	1	√			2003
2	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	1	√			2003
3	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	√			2010
4	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	√			2010
5	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	√			2010

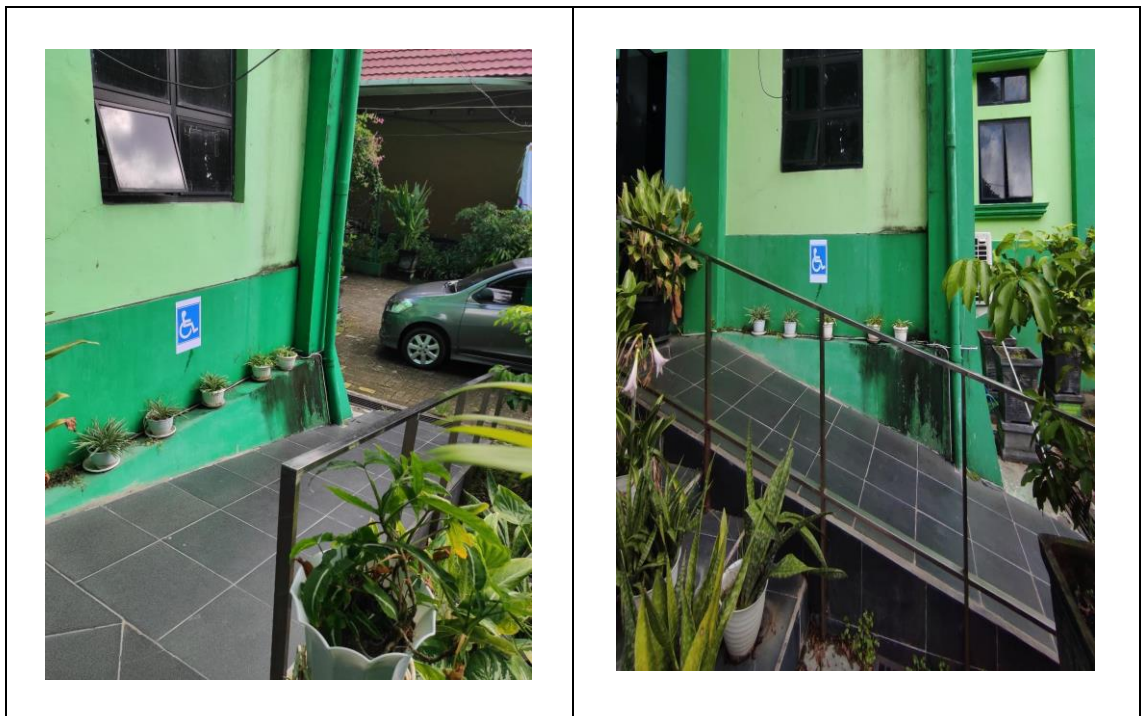
6	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1	√			2013
7	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1	√			2018
8	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1	√			2018
9	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1	√			2018
10	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1	√			2018
11	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1	√			2018
12	Jalan Desa	1	√			2018
13	Jalan Desa	1	√			2018
	BPP BJB					
14	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	√			2019
	BTPKH					
15	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	√			2013
16	Jalan Khusus Lainnya	1	√			2017
17	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	√			2018
	BBTPH					
18	Instalasi PLTA Kapasitas Kecil	1	√			2014
	PPBAT					
19	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	√			2013
20	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	√			2014
21	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	√			2013
22	Kolam Pasang	1	√			2003
23	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	√			2013
24	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	√			2012
25	Bangunan Air Kotor Lainnya	1	√			2019
E	ASET TETAP LAINNYA					
1	Ikan Air Tawar Budidaya	42 Kg	√			2020
F	ASET TAK BERWUJUD					
1	Software.....	1	√			2020

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang mendukung kesetaraan gender adalah adanya fasilitas ruang laktasi dan tangga untuk disabilitas.

a. Ruang Laktasi



b. Tangga Disabilitas



2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka ruang lingkup kinerja pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan meliputi pelayanan pada:

1. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi, rumah tangga dan pelayanan lainnya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Pelayanan diberikan terutama kepada pengendalian terhadap ketersediaan pangan yang ada di daerah, baik berupa regulasi, kebijakan maupun terjung langsung kelapangan terkait dengan penanganan daerah yang dimungkinkan berpotensi untuk mengalami rawan pangan dan upaya diversifikasi pangan .

3. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pelayanan pada usaha penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, baik berupa bibit, pupuk, alat pengolah tanah, mesin air hingga pada pembukaan lahan baru untuk petani.

4. Bidang Perikanan

Pelayanan pada usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, bimbingan usaha pengolahan perikanan dan peningkatan kesejahteraan petani ikan.

5. Bidang Peternakan

Pelayanan pada usaha produksi peternakan, peningkatan kesejahteraan petani ternak, kesehatan hewan baik di lapangan maupun di klinik hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

6. Bidang Penyuluhan

Pelayanan pada usaha masyarakat tani dan pelaku usaha dalam rangka peningkatan produksi pertanian, perikanan dan pengendalian ketahanan pangan di masyarakat.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2021					Realisasi Capaian Tahun 2016-2021					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Bidang Pangan																
1.	Ketersediaan Pangan Masyarakat (Score PPh Ketersediaan)	score	73,59	80,09	82	84	86	73,59	80,09	81,93	82,68	80,11	100%	100%	99,9%	98,43%	93%
2.	Score PPh Pola Konsumsi	score	Na	Na	91,20	90,20	90,7	Na	Na	89,20	89,9	90,1	Na	Na	97,71%	99,66%	99,33%
3.	Persentase sarana media elektronik dan media cetak yang dapat dijangkau oleh penyuluh pertanian dan masyarakat petani	%	46	66	66	88	88	46	66	66	88	88	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kenaikan kelas BPP	%	25	25	25	50	50	25	25	25	50	50	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Prosentase Kelas Kelompok Tani		Na	Na	34,55	50,91	67,27	Na	Na	34,55	50,91	67,27	Na	Na	100%	100%	100%
6.	Prosentase tenaga penyuluh pertanian PNS yang memiliki sertifikat		Na	Na	25	31,25	37,50	Na	Na	6,25	41	37,50	Na	Na	25%	131,20%	100%
7.	Prosentase tenaga penyuluh pertanian Non PNS yang memiliki sertifikat (STIPL)		Na	Na	38,46	53,85	69,23	Na	Na	63,63	53,85	69,23	Na	Na	165%	100%	100%
8.	Prosentase tenaga penyuluh pertanian yang berkinerja baik		Na	Na	100	100	100	Na	Na	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%
	Bidang Pertanian																
9.	Total Produksi Tanaman Padi Pertahun	ton	5.700	5.950	6.123	6.296	6.649	5.700	6.100	7.184	6.728	7.108	100%	97,54%	112%	106,86%	106,90%
10.	Total Produksi Tanaman Cabe Pertahun	ton	700	710	731	752	773	700	710	941,8	774,7	510	100%	100%	128,84%	103,2%	78,46%
11.	Total Produksi Tanaman Karet Pertahun	ton	900	937	952	967	982	900	937	974,945	974	958,6	100%	100%	102,4%	100,72%	127,93%
12.	Peningkatan Hasil Peternakan	ekor	Na	Na	2.659.793	2.712.413	2.766.840	Na	Na	2.660.399	2.792.257	2.820.347	Na	Na	100,02%	102,94%	101,93%
13.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Zoonosa (kasus)	kasus	Na	Na	60	57	54	Na	Na	86	21	24	Na	Na	143,3%	36,84%	44%
14.	Ternak yang terserang penyakit (ekor)	ekor	Na	Na	110	105	100	Na	Na	272	66	83	Na	Na	247,27%	62,86%	83%
15.	Prosentase Produk Pangan Segar Peternakan	%	Na	Na	4	3	2	Na	Na	1	1	1	Na	Na	25%	33,33%	50%

	Bidang Perikanan																
16.	Produksi Perikanan Budidaya	ton	5.550,65	5.828,18	6.119,59	6.425,57	6.749,85	5.550,65	5.828,18	6.500	6.860	3.120,50	100%	100%	106%	106,76%	46%
17.	Produksi Perikanan Tangkap	ton	57,32	58,47	59,84	60,83	62,05	57,32	58,47	59,84	70	36,2	100%	100%	100%	115,07%	58%
18.	Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton	69,8	78	85,8	94,38	103,8	70,46	88,22	350	113,15	158,82	99,06%	88,41%	408%	119,89%	153%

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Banjarbaru, 2016 - 2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Ketahanan Pangan		948.491.650	2.736.549.180	2.108.091.900	1.436.229.850		904.330.500	2.647.052.040	1.849.779.300	1.419.515.150		95,34%	96,73%	87,75%	98,84%		
Pertanian	3.851.461.850	2.849.024.000	4.480.776.800	3.604.761.500	2.847.753.550	2.433.522.900	2.708.481.200	3.972.033.400	2.948.781.700	2.717.112.450	63,18%	95,07%	88,65%	81,80%	95,41%		
Perikanan Kehutanan	998.015.300 667.796.500	374.936.000	1.327.548.528	2.111.099.500	2.724.018.100	906.839.100 585.272.000	334.506.000	1.292.418.528	1.901.212.600	2.652.871.700	90,86% 87,64%	89,22%	97,35%	90,06%	97,39%		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat dan isu-isu yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, berbagai tantangan yang akan dihadapi beserta peluang pengembangan dalam kurun waktu 2021-2026 yang menjadi fokus perhatian antara lain:

Tabel 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Tantangan	Peluang
Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan penanganan daerah rawan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan	Dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan legislatif dalam pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terutama untuk pengolahan hasil (agroindustri)
Pengetahuan dan Keterampilan petani, peternak, petani ikan dan pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru relatif masih sederhana dan mengandalkan kondisi alam	Akses transportasi dan informasi yang memadai untuk berhubungan dengan kabupaten dan kota lainnya
Permodalan petani pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru belum memasuki akses perbankan	Adanya Lembaga Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi yang berbasis pertanian, peternakan dan perikanan baik negeri maupun swasta Kota Banjarbaru
Pengolahan hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar daerah belum diperdagangkan secara optimal	Permintaan terhadap produk agribisnis cukup tinggi terlebih dengan adanya permintaan terhadap hasil pertanian yang organik
Investor dalam bidang agribisnis belum berkembang	Letak Kota Banjarbaru yang strategis untuk memasarkan produk komoditi agribisnis yang dihasilkan.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut diatas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru, karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru yang menjadi ruang lingkup SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tidak terlepas dari Tantangan (*Threats*) dan Peluang

(*Opportunities*) yang dihadapi selama tahun 2019 dan 2020 yang kemudian diimplementasikan menjadi visi dan misi, kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan.

Tujuan tersebut lebih lanjut diinterpretasikan menjadi sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut maka dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru.

Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari program tersebut diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai ujung tombak dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya alamnya sendiri maupun sumberdaya manusianya sebagai pelaksana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2016-2021). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta penanganan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2021-2026, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertambahan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk baik karena kelahiran atau adanya perpindahan penduduk, menyebabkan terjadi kenaikan permintaan atas produk pangan. Tingginya kebutuhan akan bahan pangan dan produk pangan menyebabkan permintaan semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan persediaan bahan pangan dan produk pangan yang berdampak kepada terjadinya kerawanan pangan.

Ditambah lagi pola pangan yang sama terutama kebutuhan akan beras yang semakin tinggi menyebabkan tingginya permintaan beras di masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan diversifikasi akan bahan pangan dan produk pangan.

2. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

a. Konversi lahan yang tidak terkendali

Keberlanjutan sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah dan perkebunan karet lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai areal pembangunan perumahan/pemukiman, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan.

b. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang ada di Kota Banjarbaru sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan ada yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

c. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

d. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Kondisi kepemilikan lahan yang sering bermasalah antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian/perkebunan untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah dan lahan perkebunan karet. Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga

lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang ada maupun pembukaan lahan baru.

3. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah sistem pengairan atau jaringan irigasi. Ketiadaan waduk di Banjarbaru membuat sistem pengairan mengandalkan pada kondisi alam. Selain itu, prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat meningkatkan produksi dan menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Permasalahan pembibitan sapi potong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurangan betina produktif akibat pemotongan betina produktif; (5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

Sistem perbibitan diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk

menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

5. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian/perkebunan yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing instansi. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan. Pengembangan pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Pemerintah daerah berupaya untuk mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan.

6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan ketahanan pangan,

pertanian dan perikanan. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- a. Kelembagaan petani, peternak dan petani ikan yang belum mempunyai posisi yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

- b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah

mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan.

c. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

7. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah. Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan

informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”

Banjarbaru Juara Terdiri Atas tiga Aspek Penting Yaitu :

- a. Maju adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
- b. Agamis adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang agamis, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- c. Sejahtera adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik.

2. Misi

Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- b. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran utama RENSTRA Badan Ketahanan Pangan periode 2020-2024 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga;
- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2020)

Tabel. 1.

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian/ Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKP Pusat	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; - Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; - Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM masih terbatas - Kualitas koordinasi antar sektor, baik top down bottom up belum sepenuhnya optimal. - Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi - Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD - Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan kota.

1. Target kinerja "Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat" Badan Ketahanan Pangan tahun 2021-2026, adalah:
 - a. Tersedianya pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 80,11 pada tahun 2020;
 - b. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
 - c. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
 - d. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Varians maksimum 5%;
 - e. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90,1 pada tahun 2020;
 - f. Meningkatnya konsumsi energi dan protein masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
 - g. Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan jumlah produk pangan yang dinyatakan aman sebanyak 13 komoditas.
2. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
 - a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi petani
 - b. Pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional
 - c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional
 - d. Peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional
 - e. Pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian
 - f. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
 - g. Pengendalian penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan
 - h. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional
 - i. Birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien
 - j. Pengelolaan anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas
3. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024
 - a. Masyarakat kelautan dan perikanan yang meningkat kesejahteraannya
 - b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat
 - c. Pengelolaan SDKP secara berkelanjutan dan berdaya saing
 - d. Tersedianya kebijakan yang berkualitas
 - e. Tersedianya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan
 - f. Tersedianya SDM KP, inovasi teknologi dan riset yang berdaya saing

- g. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif
- h. ASN KKP yang profesional
- i. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang andal
- j. Birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- k. Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota

- a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di kawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
- b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :
 - 1) Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
 - 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - 3) Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka.
- c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

- a. Sistem Prasarana Utama
 - 1) Sistem Jaringan Jalan
 - 2) Sistem Jaringan Kereta Api
 - 3) Sistem Transportasi Udara
- b. Sistem Prasarana Lainnya
 - 1) Jaringan energi/kelistrikan
 - 2) Jaringan telekomunikasi
 - 3) Jaringan sumber daya air kota
 - 4) Infrastruktur perkotaan

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

C. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasan Ulin;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
 - a. Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;
 - b. Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.
3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;
 - b. Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial,

termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

3. 4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keharusan yuridis untuk merujuk RPJP dan RPJM Nasional, serta RPJP dan RPJM Provinsi dan RPJMD Kota Banjarbaru mengindikasikan bahwa ada sejumlah isu strategis perlu diperhitungkan dalam penyusunan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah ;

“Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Penetapan isu strategis tersebut didasarkan kepada beberapa kondisi daerah saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan karena tingginya alih fungsi lahan ;
2. Kelompok Tani sebagian besar belum memiliki badan hukum ;
3. Minat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan semakin berkurang ;
4. Sumber daya aparatur yang belum berkarakter dan berjiwa melayani ;
5. Daya saing produk rendah ;
6. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan ;
7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mendukung tujuan pada RPJMD adalah sebagai berikut :

- * Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat

Begitu pula dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RPJMD seperti :

1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan.
3. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Peningkatan Sumberdaya Perikanan.
5. Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan
6. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan
7. Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian
8. Peningkatan Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru
9. Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Eselon II

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	skoring	90,20	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45
		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman	%	65	70	70	75	75	80
		Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	380,52	399,55	405,54	411,62	417,79	424,06
		Peningkatan Sumberdaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	33,39	35,05	35,75	36,46	37,18	37,92
		Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	%	2	2	2	2	2	2
		Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	ton	6.807,66	6.943,81	7.082,69	7.224,34	7.368,83	7.516,21

		Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak	ekor	2.823.400	2.851.000	2.879.000	2.905.400	2.933.000	2.961.000
		Peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang diaplikasikan	%	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan status kesehatan hewan di Kota Banjarbaru	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	250	260	275	290	300	310
		Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani	Persentase Poktan yang naik kelas/score	score	65,72	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00

Eselon III

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah	Persentase cakupan pangan yang tersalurkan	%	70	70	80	80	90	90
2.		Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kota	Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah	%	0,032	0,033	0,036	0,04	0,043	0,049
3.		Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Pangan		1.786,5	1.788	1.790	1.792	1.795	1.789
			Persentase Kelompok Binaan (KWT) yang dibina	%	5	5	5	5	5	5
4.		Peningkatan keamanan pangan melalui pengujian PSAT	Persentase rekomendasi PSAT (Pangan segar asal tumbuhan) yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
5.		Peningkatan Usaha pembudidaya ikan skala kecil	Persentase jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang	%	10	10	10	10	10	10

			mendapatkan bantuan fasilitas usaha dari pemerintah							
5.		Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi benih calon induk unggul dan produksi benih sebar	ekor	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
6.		Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	Persentase sumberdaya perikanan yang dapat di usahakan (kawasan)	%	1	1	1	1	1	1
7.		Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Produksi Usaha Poklaksar yang dinyatakan berkualitas dan aman (ton)	ton	114	116,28	118,6	122,15	125,81	129,58
8.		Peningkatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Jumlah angka konsumsi (kg/kapita/tahun)	Kg/ kapita/ tahun	50	50,5	51	51,5	52	52,5
9.		Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Luas lahan yang di garap (Ha)	Ha	30	30	30	30	30	30
10.		Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik tanaman	Persentase cakupan pemanfaatan SDG tanaman (%)	%	45	51	56	58	60	66

11.		Peningkatan kualitas bibit ternak	Prosentase jumlah kelahiran ternak yang berkualitas	%	25	35	45	50	60	75
12.		Peningkatan pengembangan ternak	Persentase ternak bantuan yang berproduksi	%	50	60	65	70	75	80
			Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota	%	5	10	15	20	25	30
13.		Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan	%	5	5	5	5	5	5
			Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan	%	10	10	10	10	10	10
			Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan	%	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
14.		Peningkatan pelayanan penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak	Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
15.		Peningkatan pembinaan tempat pemotongan (tempat pemotongan hewan dan tempat pemotongan unggas)	Persentase tempat pemotongan hewan yang dibina	%	10	10	10	10	10	10

16.		Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner tepat waktu dan tepat syarat (%)	%	75	75	75	75	75	75
17.		Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani	unit	4	4	5	5	6	6

Esselon IV

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		Tersedianya Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Informasi neraca bahan makanan yang tersedia (kali)	kali	12	12	12	12	12	12
		Terlaksananya Penyediaan Beras	Jumlah Beras yang disediakan	ton	4	6	8	10	12	14
		Terlaksananya monitoring stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah laporan hasil pemantauan pasokan dan harga bahan pokok di Kota banjarbaru	kali	12	12	12	12	12	12
		Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1

		Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia (ton)	ton	22	23	25	28	30	35
		Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita per tahun	Jumlah dokumen target konsumsi pangan yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembinaan kelompok P2L dan UMKM - Terlaksananya bantuan bibit tanaman, sayuran, toga dan pupuk kandang - Terlaksananya lomba B2SA dan Lomba Kelompok P2L 	Jumlah pembinaan kelompok P2L yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12
		Terselenggaranya legalisasi PSAT	Persentase PSAT yang di uji (%)	%	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang tersedia (buah)	buah	60	60	60	60	60	60
		Terlaksananya Bimtek, Pembinaan dan Monev	Jumlah Pokdakan/UPR yang telah menerapkan CPIB, CBIB	Kelompok	5	5	5	5	5	5

		Tersedianya prasarana pembudidaya ikan	Jumlah prasarana pembudidaya ikan	buah	5	7	7	11	8	5
		Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum	Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12
		Terselenggaranya bimtek bagi poklamsar	Jumlah poklamsar yang telah melaksanakan pengolahan ikan yang baik berdasarkan CPIB	kelompok	1	2	2	2	3	3
		Terlaksananya pembinaan calon poklamsar	Jumlah poklamsar baru	kelompok	1	1	1	1	1	1
		Terlaksananya pemberian fasilitas usaha pengolahan ikan bagi poklamsar	Jumlah poklamsar yang mendapatkan fasilitas	kelompok	2	2	3	3	3	4
		Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah sarana pertanian yang diberikan (ha)	ha	0,5	1	2	3	3	3
			Jumlah pelatihan/bimtek/sekolah lapang yang dilaksanakan (kali)	kali	5	6	7	7	7	7

		Terlaksananya pendampingan/ pelatihan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelatihan/bimtek/rapat koordinasi/sosialisasi (kali)	kali	6	6	6	6	6	6
			Jumlah sarana pertanian yang diberikan (ha)	ha	5	10	10	10	10	10
		Terlaksananya peningkatan kualitas SDG tanaman	Persentase Sumber Daya Genetik tanaman yang dimanfaatkan penangkar (%)	%	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya IB Ternak	Jumlah ternak yang di Inseminasi Buatan (IB) (ekor)	ekor	75	100	125	150	175	200
		Terlaksananya distribusi bantuan ternak	Jumlah ternak yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	ekor	500	500	500	500	500	500
		Terlaksananya penyediaan bibit ternak yang berkualitas di wilayah kota	Jumlah bibit ternak (DOC) yang dihasilkan	ekor	600	650	700	750	800	850
		Terlaksananya koordinasi	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (kali)	kali	6	8	8	8	8	8
		Tersusunnya masterplan pengembangan	Jumlah dokumen masterplan yang tersusun	dokumen	0	0	0	0	0	1

		perkebunan								
		Terlaksananya peningkatan kualitas mutu hasil perkebunan	Peningkatan kualitas kadar kering karet (K3)	%	40	42	45	50	55	60
		Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	Jumlah vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	ekor	500	550	600	650	700	750
		Terlaksananya pengobatan pada hewan/ternak	Jumlah hewan/ternak yang di obati	ekor	25	50	75	100	125	150
		Terlaksananya pengambilan sampel produk asal hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diambil	sampel	5	5	5	5	5	5
		Terlaksananya penanganan kesehatan hewan dan jasa laboratorium	Jumlah pelayanan penanganan kesehatan hewan (ekor)	ekor	25	28	31	34	37	40
			Jumlah pelayanan jasa laboratorium (sampel)	sampel	24	28	31	32	33	34
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian	Jumlah kompetensi penyuluh dan petani (orang)	orang	52	56	60	65	70	75

		Terlaksananya pembinaan kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kelompok	4	4	5	5	6	6
		Terlaksananya penyediaan sarpras media informasi penyuluhan	Jumlah media informasi (buah)	buah	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya fasilitasi pembentukan badan hukum milik kelompok tani	Persentase jumlah kelompok tani yang berbadan hukum (kelompok)	kelompok	2	3	3	4	4	4

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera			
MISI : 2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat.	1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.1 Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah	1.1.1 Melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah. 2.1.1 Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
		1.2 Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	1.2.1 Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal
		1.3 Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun	1.3.1 Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun 1.3.2 Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
	2. Meningkatnya Pengawasan Pangan	2.1 Peningkatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	2.1.1 Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota 2.1.2 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

	3. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	3.1 Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya	<p>3.1.1 Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</p> <p>3.1.2 Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota</p> <p>3.1.3 Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan</p>
	4. Meningkatnya produksi sumberdaya perikanan	4.1 Peningkatan sumberdaya perikanan	4.1.1 Pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum
	5. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	5.2 Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	<p>5.2.1 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</p> <p>5.2.2 Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <p>5.2.3 Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p>
	6. Meningkatnya pengembangan sarana pertanian/peternakan	6.1 Peningkatan pengembangan sarana pertanian/peternakan	6.1.1 Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi

		6.2 Peningkatan populasi ternak	6.2.1 Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan tanaman skala kecil 6.2.2 Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
	7. Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian	7.1 Peningkatan penyediaan prasarana pertanian	7.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian
	8. Meningkatnya status kesehatan hewan di Kota Banjarbaru	8.1 Peningkatan status kesehatan hewan	8.1.1 Pembebasan penyakit hewan menular dan zoonosis 8.1.2 Penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner
	9. Meningkatnya kelembagaan penyuluhan dan petani	9.1 Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani	9.1.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa 9.1.2 Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa 9.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Satuan	DATA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN													
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				12.511.807.155		13.035.672.700		14.339.241.000		15.775.832.000		17.393.487.000		19.178.922.000		19.178.922.000	
			BELANJA																	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	indeks	B	B	10.879.901.525	B	11.602.690.125	BB	12.762.961.000	BB	14.039.259.000	A	15.443.189.000	A	16.987.515.000		16.987.515.000
							9.624.946.025		9.630.266.025		10.593.293.000		11.652.623.000		12.817.886.000		14.099.676.000		14.099.676.000	
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
							1.254.955.500		1.972.424.100		2.169.668.000		2.386.636.000		2.625.303.000		2.887.839.000		2.887.839.000	

	Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%	5	5	69.600.000	5	69.600.000	5	76.560.000	5	84.216.000	5	92.638.000	5	101.902.000	5	101.902.000
				Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD	09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000	2	29.282.000
				Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1	
	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	49.600.000	3	49.600.000	3	54.560.000	3	60.016.000	3	66.018.000	3	72.620.000	3	72.620.000
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%	100	100	9.555.346.025	100	9.560.666.025	100	10.516.733.000	100	11.568.407.000	100	12.725.248.000	100	13.997.774.000	100	13.997.774.000
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	orang	98	98	9.372.724.275	98	9.372.724.275	98	10.309.997.000	98	11.340.997.000	98	12.475.097.000	98	13.722.607.000	98	13.722.607.000
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	laporan	2	2	44.680.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	2	73.205.000
	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKDP	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	laporan	1	1	137.941.750	1	137.941.750	1	151.736.000	1	166.910.000	1	183.601.000	1	201.962.000	1	201.962.000

	Peningkatan kompetensi ASN SKPD	09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplem ntasikan hasil bimtek dan diklatnya	%	100	100	25.000.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	39.930.000	100	43.923.000	100	43.923.000
	Terlaksananya Peningkatan kompetensi melalui Diklat	09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat	peserta	5	5	25.000.000	6	30.000.000	7	33.000.000	8	36.300.000	9	39.930.000	10	43.923.000	10	43.923.000
	Peningkatan kompetensi ASN SKPD	09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	tahun	1	1	462.105.500	1	666.292.100	1	732.922.000	1	806.215.000	1	886.838.000	1	975.523.000	1	931.600.000
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	paket	2	2	16.415.100	2	16.415.100	2	18.057.000	2	19.863.000	2	21.850.000	2	24.035.000	2	24.035.000
	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	paket	6	6	203.707.400	6	209.427.000	6	230.370.000	6	253.407.000	6	278.748.000	6	306.623.000	6	306.623.000
	Terlaksananya penyediaan pengadaan	09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lembar	32.000	32.000	15.000.000	32.000	16.750.000	32.000	18.425.000	32.000	20.268.000	32.000	22.295.000	32.000	24.525.000	32.000	24.525.000
	Terlaksananya penyediaan barang cetakan			Jumlah barang cetakan yang tersedia	eks	70 eks	70 eks		70 eks		70 eks		70 eks		70 eks		70 eks		70 eks	
	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan atau buku peraturan	09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	eks	450 eks	450 eks	27.000.000	450 eks	27.000.000	450 eks	29.700.000	450 eks	32.670.000	450 eks	35.937.000	450 eks	39.531.000	450 eks	39.531.000
	Terlaksananya perjalanan dinas	09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	laporan	100	100	199.983.000	100	396.700.000	100	436.370.000	100	480.007.000	100	528.008.000	100	580.809.000	100	536.886.000
	Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	%	100	100	133.750.000	100	242.500.000	100	266.750.000	100	293.425.000	100	322.768.000	100	355.046.000	100	355.046.000

	Terlaksananya pengadaan mebel	09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu,dst) yang dibeli	buah	17	17	39.750.000	17	45.000.000	17	49.500.000	17	54.450.000	17	59.895.000	17	65.885.000	17	65.885.000
	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya (perontok padi) yang dibeli	buah	8	8	31.200.000	8	102.500.000	8	112.750.000	8	124.025.000	8	136.428.000	8	150.071.000	8	150.071.000
	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (lahan parkir, pagar) yang terbangunan	paket	3	3	62.800.000	3	95.000.000	3	104.500.000	3	114.950.000	3	126.445.000	3	139.090.000	3	139.090.000
	Peningkatan Fasilitas penggunaan jasa pihak ketiga	09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	100	293.400.000	100	293.400.000	100	322.740.000	100	355.014.000	100	390.516.000	100	429.569.000	100	429.569.000
	Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	macam	4	4	259.800.000	4	259.800.000	4	285.780.000	4	314.358.000	4	345.794.000	4	380.374.000	4	380.374.000
	Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN	09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	orang	4	4	33.600.000	4	33.600.000	4	36.960.000	4	40.656.000	4	44.722.000	4	49.195.000	4	49.195.000
	Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	340.700.000	100	740.232.000	100	814.256.000	100	895.682.000	100	985.251.000	100	1.083.778.000	100	1.083.778.000

	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	unit	1	1	31.696.000	1	31.700.000	1	34.870.000	1	38.357.000	1	42.193.000	1	46.413.000	1	46.413.000
	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	unit	65	65	169.959.000	65	377.532.000	65	415.286.000	65	456.815.000	65	502.497.000	65	552.747.000	65	552.747.000
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	50	50	23.045.000	50	24.000.000	50	26.400.000	50	29.040.000	50	31.944.000	50	35.139.000	50	35.139.000
	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara	paket	4	4	110.000.000	4	300.000.000	4	330.000.000	4	363.000.000	4	399.300.000	4	439.230.000	4	439.230.000
	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	paket	15	15	6.000.000	15	7.000.000	15	7.700.000	15	8.470.000	15	9.317.000	15	10.249.000	15	10.249.000
	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Scoring	90,1	90,2	1.532.450.130	90,25	1.318.608.750	90,30	1.450.469.000	90,35	1.598.181.000	90,40	1.798.066.500	90,45	2.023.952.000	90,45	2.023.952.000

Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah	2.09.0 3.2.01	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA STABILITAS	Prosentase cakupan pangan yang tersalurkan	%	65	70	716.910.880	70	358.484.000	80	394.332.000	80	436.430.000	90	483.137.000	90	534.975.000	90	534.975.000
Tersedianya Informasi neraca bahan makanan (NBM)	2.09.0 3.2.01.01	PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN	Jumlah Informasi neraca bahan makanan yang tersedia	kali	12	12	35.783.500	12	48.450.000	12	53.295.000	12	61.289.000	12	70.482.000	12	81.054.000	12	81.054.000
Terlaksananya Penyediaan Beras	2.09.0 3.2.01.02	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Jumlah Beras yang disediakan	ton	4	4	649.339.880	6	267.784.000	8	294.562.000	10	324.018.000	12	356.420.000	14	392.062.000	14	392.062.000
Terlaksananya monitoring stok, pasokan dan harga pangan	2.09.0 3.2.01.04	PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Jumlah laporan hasil pemantauan pasokan dan harga bahan pokok di Kota Banjarbaru	kali	12	12	31.787.500	12	42.250.000	12	46.475.000	12	51.123.000	12	56.235.000	12	61.859.000	12	61.859.000
Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab./Kota	2.09.0 3.2.02	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah (%)	%	0,032	0,032	382.947.500	0,033	348.500.000	0,036	383.350.000	0,040	421.685.000	0,043	463.853.500	0,049	510.239.000	0,049	510.239.000
Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	2.09.0 3.2.02.02	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PANGAN LOKAL	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang tersusun	Doku men	1	1	117.248.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	219.615.000
Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah	2.09.0 3.2.02.03	PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia	(ton)	22	22	265.699.500	23	198.500.000	25	218.350.000	28	240.185.000	30	264.203.500	35	290.624.000	35	290.624.000

	Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.0 3.2.04	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	1. Angka Konsumsi Pangan		1.786,5	1.786,5	432.591.750	1.788	611.624.750	1.790	672.787.000	1.792	740.066.000	1.795	851.076.000	1.789	978.738.000	1.798	978.738.000
	Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita per tahun	2.09.0 3.2.04. 01	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	Jumlah Dokumen target konsumsi pangan yang tersusun	Dokumen	1	1	39.024.750	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	83.490.000	1	96.014.000	1	96.014.000
	1. Terlaksananya pembinaan kelompok P2L dan UMKM	2.09.0 3.2.04. 02	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Jumlah Pembinaan kelompok P2L yang dilaksanakan	kali	12	12	393.567.000	12	551.624.750	12	606.787.000	12	667.466.000	12	767.586.000	12	882.724.000	12	882.724.000
	2. Terlaksananya bantuan bibit tanaman, sayuran, toga dan pupuk kandang																			
	3. Terlaksananya lomba B2SA dan Lomba Kelompok P2L																			
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	2.09.0 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman	%	60	65	99.455.500	70	114.373.825	70	125.811.000	75	138.392.000	75	152.231.500	80	167.455.000	80	167.455.000
	Peningkatan Keamanan Pangan melalui pengujian PSAT (pangan segar asal tumbuhan)	2.09.0 5.2.01	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) yang diterbitkan (%)	%	100	100	99.455.500	100	114.373.825	100	125.811.000	100	138.392.000	100	152.231.500	100	167.455.000	100	167.455.000
	Terselenggaranya legalisasi PSAT	2.09.0 5.2.01. 01	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase PSAT yang diuji (%)	%	100	100	10.000.000	100	11.500.000	100	12.650.000	100	13.915.000	100	15.306.500	100	16.837.000	100	16.837.000

	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	2.09.05.2.01.05	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang tersedia (buah)	buah	60	60	89.455.500	60	102.873.825	60	113.161.000	60	124.477.000	60	136.925.000	60	150.618.000	60	150.618.000
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				1.638.703.400		1.876.470.890		2.064.118.000		2.341.895.000		2.658.154.000		3.018.352.000		2.871.941.900	
			BELANJA																	
	Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	362,40	380,52	1.440.771.900	399,55	1.630.567.890	405,54	1.793.624.000	411,62	2.043.076.000	417,79	2.327.986.000	424,06	2.653.479.000	424,06	2.507.068.900
	Peningkatan Usaha Pembudidayaan ikan skala kecil	3.25.04.2.02	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Persentase Jumlah rumah tangga pembudidayaan ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah	RTP	10	10	329.992.000	10	356.210.000	10	391.831.000	10	431.014.000	10	474.115.000	10	521.527.000	10	375.117.000
	Terlaksananya Bimtek, Pembinaan dan Monev	3.25.04.2.02.04	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU, PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Jumlah Pokdakan/UPR yang telah menerapkan CPIB, CBIB	Kelompok	5	5	329.992.000	5	356.210.000	5	391.831.000	5	431.014.000	5	474.115.000	5	521.527.000	5	375.117.000
	Peningkatan sumberdaya perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	31,8	33,39	19.261.000	35,05	23.190.000	35,75	25.509.000	36,46	29.335.000	37,18	33.735.000	37,92	38.796.000	37,92	38.796.000

	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	3.25.0 5.2.01	PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	Persentase Sumberdaya Perikanan yang dapat diusahakan (kawasan)	%	1	1	19.261.000	1	23.190.000	1	25.509.000	1	29.335.000	1	33.735.000	1	38.796.000	1	38.796.000
	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum	3.25.0 5.2.01. 01	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/ KOTA	Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan	kali	12	12	19.261.000	12	23.190.000	12	25.509.000	12	29.335.000	12	33.735.000	12	38.796.000	12	38.796.000
	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	%	113,15	2%	178.670.500	2%	222.713.000	2%	244.985.000	2%	269.484.000	2%	296.433.000	2%	326.077.000	2%	326.077.000
	Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	3.25.0 6.2.02	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah produksi usaha poklhasar yang dinyatakan berkualitas dan aman	ton	112,5	114	48.430.000	116,28	52.045.500	118,60	57.250.000	122,15	62.975.000	125,81	69.273.000	129,58	76.201.000	129,58	76.201.000
	Terselenggaranya bimtek bagi poklhasar	3.25.0 6.2.02. 01	PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah Poklhasar yang telah melaksanakan pengolahan ikan yang baik berdasarkan CPIB	Kelompok	1	1	48.430.000	2	52.045.500	2	57.250.000	2	62.975.000	3	69.273.000	3	76.201.000	3	76.201.000

	Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3.25.06.2.03	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Angka Konsumsi (kg/kapita/tahun)	Kg/kapita/tahun	50	50	130.240.500	50,5	170.667.500	51	187.735.000	51,5	206.509.000	52	227.160.000	52,5	249.876.000	52,5	249.876.000
	Terlaksananya Pembinaan Calon Poklahsar	3.25.06.2.03.01	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Poklahsar baru	kelompok	1	1	48.195.000	1	85.072.500	1	93.580.000	1	102.938.000	1	113.232.000	1	124.555.000	1	124.555.000
	Terlaksananya Pemberian Fasilitas Usaha Pengolahan Ikan bagi Poklahsar	3.25.06.2.03.02	PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan fasilitas	kelompok	2	2	82.045.500	2	85.595.000	3	94.155.000	3	103.571.000	3	113.928.000	4	125.321.000	4	125.321.000
		3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					3.379.563.100		5.413.819.700		5.955.199.000		6.550.716.000		7.205.785.000		7.926.364.000		12.625.947.000
			BELANJA																	
	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	ton	6.671,51	6.807,66	2.618.644.000	6.943,81	209.880.000	7.082,69	3.530.868.000	7.224,34	3.883.954.000	7.368,83	4.272.349.000	7.516,21	4.699.583.000	7.516,21	9.399.166.000
	Peningkatan Populasi Ternak			Jumlah Populasi ternak	ekor	2.800.000	2.823.400		2.851.000		2.879.000		2.905.400		2.993.000		2.961.000		2.961.000	
	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	Luas lahan yang digarap (ha)	ha	30	30	352.914.000	30	413.000.000	30	454.300.000	30	499.730.000	30	549.703.000	30	604.673.000	30	604.673.000

	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.0 2.2.01.01	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMUNITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	Jumlah sarana pertanian yang diberikan (ha)	ha	0,5	0,5	239.794.000	1	173.000.000	2	190.300.000	3	209.330.000	3	230.263.000	3	253.289.000	3	253.289.000
				Jumlah pelatihan/bimtek/sekolah lapang yang dilaksanakan (kali)	kali	5	5		6		7		7		7		7		7	
	Terlaksananya pendampingan / pelatihan penggunaan sarana pendukung pertanian	3.27.0 2.2.01.02	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	Jumlah pelatihan / bimtek/rapat koordinasi/sosialisasi (kali)	kali	6	6	113.120.000	6	240.000.000	6	264.000.000	6	290.400.000	6	319.440.000	6	351.384.000	6	351.384.000
				Jumlah sarana pertanian yang diberikan (ha)	ha	5	5		10		10		10		10		10		10	
	Peningkatan pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman	3.27.02.2.02	PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG tanaman (%)	%	45	45	313.280.000	51	150.000.000	56	165.000.000	58	181.500.000	60	199.650.000	66	219.615.000	66	219.615.000
	Terlaksananya peningkatan kualitas SDG tanaman	3.27.02.2.01	PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG HEWAN/ TANAMAN	Persentase Sumber Daya Genetik tanaman yang dimanfaatkan penangkar (%)	%	100	100	313.280.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	100	219.615.000
	Peningkatan Kualitas Bibit Ternak	3.27.02.2.03	PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah kelahiran ternak yang berkualitas (%)	%	25	25	294.600.000	35	417.830.000	45	459.613.000	50	505.574.000	60	556.131.000	75	611.744.000	75	611.744.000
	Terlaksananya IB ternak	3.27.0 2.2.03.01	PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK,BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	Jumlah ternak yang di inseminasi Buatan	(Ekor)	50	75	294.600.000	100	417.830.000	125	459.613.000	150	505.574.000	175	556.131.000	200	611.744.000	200	611.744.000

	Peningkatan Pengembangan Ternak	3.27.0 2.2.05	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HAJUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ternak bantuan yang berproduksi (%)	%	50	50	1.657.850.000	60	2.229.050.000	65	2.451.955.000	70	2.697.150.000	75	2.966.865.000	80	3.263.551.000	80	3.263.551.000
				Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota (%)	%	5	5		10		15		20		25		30		30	
	Terlaksananya distribusi bantuan ternak	3.27.0 2.2.05. 01	PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah ternak yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	Ekor	500	500	1.213.050.000	500	1.759.050.000	500	1.934.955.000	500	2.128.450.000	500	2.341.295.000	500	2.575.424.000	500	2.575.424.000
	Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	3.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan	%	1	100	175.480.000	100	446.576.000	100	491.234.000	100	540.358.000	100	594.394.000	100	653.834.000	100	653.834.000
	Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.0 3.2.01	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan	%	5	5	175.480.000	5	446.576.000	5	491.234.000	5	540.358.000	5	594.394.000	5	653.834.000	5	653.834.000
				Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan	%	10	10		10		10		10		10		10		10	
				Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan	%	0,0009	0,0009		0,0009		0,0009		0,0009		0,0009		0,0009		0,0009	
	Terlaksananya Koordinasi	3.27.0 3.2.01. 03	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	6	6	100.240.000	8	336.288.000	8	369.917.000	8	406.909.000	8	447.600.000	8	492.360.000	8	492.360.000
	Tersusunnya masterplan pengembangan perkebunan	3.27.0 3.2.01. 04	PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERKEBUNAN	Jumlah dokumen masterplan yang tersusun	Dokumen	0	0	75.240.000	0	110.288.000	0	121.317.000	0	133.449.000	0	146.794.000	1	161.474.000	1	161.474.000

	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Mutu Hasil Perkebunan			Peningkatan Kualitas Kadar Kering Karet (K3)	%	40	40		42		45		50		55		60		60	
	Peningkatan status kesehatan hewan di Kota Banjarbaru	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	240	250	123.954.000	260	164.438.500	275	180.882.000	290	198.969.000	300	218.865.000	310	240.752.000	310	240.752.000
	Peningkatan pelayanan penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak	3.27.04.2.01	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani	%	100	100	68.954.000	100	92.488.500	100	101.737.000	100	111.910.000	100	123.101.000	100	135.412.000	100	135.412.000
	Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	3.27.04.2.01.01	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS	Jumlah vaksinasi Rabies pada hewan pembawa rabies	ekor	450	500	30.000.000	550	44.430.000	600	48.873.000	650	53.760.000	700	59.136.000	750	65.050.000	750	65.050.000
	Terlaksananya Pengobatan pada hewan/ternak	3.27.04.2.01.02	PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah hewan/ternak yang diobati	ekor	20	25	38.954.000	50	48.058.500	75	52.864.000	100	58.150.000	125	63.965.000	150	70.362.000	150	70.362.000
	Peningkatan Pembinaa Tempat Pemotongan (Tempat Pemotongan Hewan dan Tempat Pemotongan Unggas)	3.27.04.2.02	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tempat Pemotongan Hewan yang dibina	%	10	10	20.000.000	10	31.700.000	10	34.870.000	10	38.357.000	10	42.192.000	10	46.411.000	10	46.411.000
	Terlaksananya pengambilan sampel produk asal hewan	3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah sampel produk asal hewan yang di ambil	sampel	5	5	20.000.000	5	31.700.000	5	34.870.000	5	38.357.000	5	42.192.000	5	46.411.000		46.411.000
	Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah poktan yang naik kelas/score	%	60,15	65,72	461.485.100	67,00	1.592.925.200	68,00	1.752.215.000	69,00	1.927.435.000	70,00	2.120.177.000	71,00	2.332.195.000	71,00	2.332.195.000

	Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani	3.27.0 7.2.01	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan dan Petani (unit)	unit	4	4	461.485.100	4	1.592.925.200	5	1.752.215.000	5	1.927.435.000	6	2.120.177.000	6	2.332.195.000	6	2.332.195.000
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh Pertanian	3.27.0 7.2.01. 01	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kompetensi Penyuluh dan Petani (orang)	orang	52	52	69.705.600	56	601.925.400	60	662.117.000	65	728.328.000	70	801.160.000	75	881.276.000	75	881.276.000
	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tani	3.27.0 7.2.01. 02	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas (kelompok)	Kelompok	4	4	323.361.900	4	370.895.900	5	407.985.000	5	448.783.000	6	493.661.000	6	543.027.000	6	543.027.000
	Terlaksananya Penyediaan Sarpras Media Informasi Penyuluhan	3.27.0 7.2.01. 03	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Media Informasi (buah)	buah	5	5	56.443.000	6	349.899.900	7	384.889.000	8	423.378.000	9	465.716.000	10	512.288.000	10	512.288.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Badan Hukum Milik Kelompok Tani	3.27.0 7.2.01. 04	PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Berbadan Hukum (Kelompok)	%	2	2	11.974.600	3	270.204.000	3	297.224.000	4	326.946.000	4	359.640.000	4	395.604.000	4	395.604.000

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
UPT. BALAI PEMBIBITAN TERNAK PUSAT KESEHATAN HEWAN (BPTPKH)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ PROGRAM (SASARAN)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	DATA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN													
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					479.800.000		510.250.000		561.275.000		617.402.000		679.142.000		747.056.000		747.056.000
			BELANJA																	
	Peningkatan Populasi Ternak	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi ternak	ekor	2.800.000	2.823.400	444.800.000	2.851.000	470.000.000	2.879.000	517.000.000	2.905.400	568.700.000	2.993.000	625.570.000	2.961.000	688.127.000	2.961.000	688.127.000
	Peningkatan Pengembangan Ternak	3.27.02.2.05	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ternak bantuan yang berproduksi (%)	%	50	50	444.800.000	60	470.000.000	65	517.000.000	70	568.700.000	75	625.570.000	80	688.127.000	80	688.127.000
				Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota (%)	%	5	5		10		15		20		25		30		30	
	Terlaksananya penyediaan bibit ternak yang berkualitas di wilayah kota	3.27.02.2.05.05	PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	Jumlah bibit ternak (DOC) yang dihasilkan	Ekor	600	600	444.800.000	650	470.000.000	700	517.000.000	750	568.700.000	800	625.570.000	850	688.127.000	850	688.127.000

	Meningkat nya kesehatan hewan di Kota Banjarbaru	3.27.0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	240	250	35.000.000	260	40.250.000	275	44.275.000	290	48.702.000	300	53.572.000	310	58.929.000	310	58.929.000
	Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner dalam daerah Kab/Kota	3.27.0 4.2.03	PENGLOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner tepat waktu dan tepat syarat	%	75	75	35.000.000	75	40.250.000	75	44.275.000	75	48.702.000	75	53.572.000	75	58.929.000	75	58.929.000
	Terlaksananya Penanganan Kesehatan Hewan dan Jasa Laboratorium	3.27.0 4.2.03. 01	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM	Jumlah Pelayanan Penanganan Kesehatan Hewan (ekor)	ekor	25	25	35.000.000	28	40.250.000	31	44.275.000	34	48.702.000	37	53.572.000	40	58.929.000	40	58.929.000
				Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (sampel)	sampel	24	24		28		31		32		33		34		34	

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
UPT. BALAI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR (PPBAT)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/PR OGRAM (SASARAN)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	DATA AWAL PEREN CANA AN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN													
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					1.110.779.900		1.274.357.890		1.401.793.000		1.612.062.000		1.853.871.000		2.131.952.000		2.131.951.900
			BELANJA																	
	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	362,40	380,52	1.110.779.900	399,55	1.274.357.890	405,54	1.401.793.000	411,62	1.612.062.000	417,79	1.853.871.000	424,06	2.131.952.000	424,06	2.131.951.900
	Peningkatan Pengelolaan Pembudidaya an Ikan	3.25.04. 2.04	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	Jumlah Produksi Benih Calon Induk Unggul dan Produksi Benih Sebar (ekor)	ekor	500.000	500.000	1.110.779.900	550.000	1.274.357.890	600.000	1.401.793.000	650.000	1.612.062.000	700.000	1.853.871.000	750.000	2.131.952.000	750.000	2.131.951.900
	Tersedianya Prasarana Pembudidaya Ikan	3.25.04. 2.04.02	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan	buah	5	5	1.110.779.900	7	1.274.357.890	7	1.401.793.000	11	1.612.062.000	8	1.853.871.000	5	2.131.952.000	5	2.131.951.900

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
2.	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Scoring	90,1	90,2	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45	90,45
4.	Presentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman	%	60	65	70	70	75	75	80	80

5.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	362,40	380,52	399,55	405,54	411,62	417,79	424,06	424,06
6.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	31,80	33,39	35,05	35,75	36,46	37,18	37,92	37,92
7.	Prosentase Pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	%	113,15	2	2	2	2	2	2	2
8.	Jumlah Produksi tanaman pangan (padi) (ton)	ton	6.671,51	6.807,66	6.943,81	7.082,69	7.224,34	7.368,83	7.516,21	7.516,21
9.	Jumlah Populasi Ternak	ekor	2.800.000	2.823.400	2.851.000	2.879.000	2.905.400	2.993.000	2.961.000	2.961.000
10.	Persentase Prasarana Pertanian yang aplikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah hewan yang tertangani	ekor	240	250	260	275	290	300	310	310
12.	Prosentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score	%	60,15	65,72	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai jawaban terhadap tuntutan reformasi dalam hal transparansi perencanaan, sebagaimana telah digariskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru berkewajiban untuk menyusun suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran visi, misi dan program Walikota Banjarbaru dan merupakan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di lingkungan Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan, sehingga Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk program 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan acuan dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan pada bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan selama kurun tahun 2021-2026, sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dapat berjalan dengan baik dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai serta dapat dipertanggungjawabkan.

Renstra juga sebagai pedoman penilaian pencapaian visi dan misi, maka setiap akhir tahun akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap kinerja kebijakan sangat diperlukan agar program dan kegiatan tetap terarah menuju kepada visi dan misi yang telah disepakati.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmonis di semua tingkatan. Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya khususnya dalam

mewujudkan keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Banjarbaru, APBD Propinsi dan APBN.

L A M P I R A N



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/268/KUM/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diverifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Dinas Pendidikan;
 11. Dinas Kesehatan;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 13. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 14. Dinas Lingkungan Hidup;
 15. Dinas Perhubungan;
 16. Dinas Sosial;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 19. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 21. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 23. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 24. Dinas Perdagangan;
 25. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 26. Rumah Sakit Daerah Idaman;
 27. Satuan Polisi Pamong Praja;
 28. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 29. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 30. Kecamatan Landasan Ulin;
 31. Kecamatan Liang Anggang;
 32. Kecamatan Cempaka.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA BANJARBARU

TAHUN 2021-2026

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR 007 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021-2026

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 perlu disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang memuat tentang Perencanaan Strategi, Visi dan Misi, arah kebijakan, serta kaidah pelaksanaannya sebagai pernyataan unsur pimpinan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 beserta perangkatnya dalam rangka sebagai pelaksana dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diperlukan penunjukan tenaga pelaksana kegiatan yang tergabung dalam sebuah tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 62);
32. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dengan daftar nama Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan rencana strategis;
 - b. menganalisa data rencana strategis;
 - c. memeriksa data rencana strategis;
 - d. mengolah data rencana strategis;
 - e. menyusun rancangan akhir/perbaiki rencana strategis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 4 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN,




Hj. SITI HAMDAN, SP, MT.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681229 199703 2 003

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Nomor : 007/SK/DKP-3/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Koordinator
5	Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan	Koordinator
6	Kepala Bidang Peternakan	Koordinator
7	Kepala Bidang Penyuluhan	Koordinator
8	Kepala Bidang Perikanan	Koordinator
9	Kepala Seksi Pengembangan SDM Penyuluhan dan Petani	Anggota
10	Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
11	Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan	Anggota
12	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
13	Kepala Seksi Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
14	Staf Perencanaan	Anggota
15	Staf Perencanaan	Anggota
16	Staf Perencanaan	Anggota

PENGGUNA ANGGARAN,

Hj. SITI HAMDHAH, SP, MT.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681229 199703 2 003